

**ANALISIS PERAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM DAN CANGKIR
KAMISAN DALAM PENYUSUNAN AGENDA *SETTING* TERHADAP
PENAMBAHAN VISI MISI KOTA METRO 2016**

(Tesis)

Oleh

DITA PURNAMA



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

ANALISIS PERAN HMI DAN CANGKIR KAMISAN DALAM PENYUSUNAN *AGENDA SETTING* TERHADAP PENAMBAHAN VISI KOTA METRO

Oleh

DITA PURNAMA

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Forum Berbicang Berfikir Kamisan (Cangkir Kamisan) merupakan salah satu *civil society* yang berperan aktif mengontrol kebijakan Pemerintah Kota Metro mengenai penambahan visi misi Kota Metro. Atas dasar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran HMI dan Cangkir Kamisan dalam menjalankan fungsi kontrol dan penyusunan *agenda setting* terkait kebijakan publik di Kota Metro. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dan teknik keabsahan data menggunakan triangulasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa HMI Kota Metro telah berperan sebagai komplementer yang diwujudkan dalam wadah bagi aspirasi masyarakat. Selanjutnya, HMI juga berperan sebagai tandingan negara yang diwujudkan dalam bentuk advokasi dan pendampingan. Sementara itu Cangkir Kamisan telah berperan sebagai komplementer dan subditor yang diwujudkan dalam budaya literasi dan menulis untuk membentuk persepsi publik. Upaya yang telah dilakukan oleh HMI dan Cangkir Kamisan dalam penyusunan *agenda setting* tersebut nyatanya belum mampu mendatangkan hasil yang optimal dalam menyanggah penambahan visi Kota Metro. Hal ini terganjal oleh adanya peraturan Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan bahwa visi yang telah disampaikan sebelumnya oleh pasangan calon walikota dan calon wakil walikota ketika proses kampanye telah terangkum dalam dokumen DPRD dan KPUD sehingga visi tersebut tidak bisa dirubah.

Kata Kunci : *Civil Society, Agenda Setting, Analisis Kebijakan, Visi Kota Metro*

ABSTRACT

ANALYSIST OF THE ROLE OF HMI AND *CANGKIR KAMISAN* IN COMPOSING AGENDA SETTING TOWARDS THE ADDITION OF VISION OF METRO CITY

By

DITA PURNAMA

The problem related to the role of civil society emerged and developed along with the policy process that is made especially in the government. In the Metro city case study, the role of HMI and *Cangkir Kamisan* as one of the civil society that fight for the prosperity of Metro city community in particular. It is believed that the changes of the vision of Metro city are not in accordance with the vision in the previous era, so that the changes of the vision of Metro city become the main problem in this research. This study aims to find and analyze the strength of HMI and *Cangkir Kamisan* related to changes in the vision of the Metro city. Knowing and analyzing the strengths of HMI and *Cangkir Kamisan* as civil society through the composing of the agenda of public policy setting. The type of this research is descriptive with qualitative approach. The data sources for this research are in-depth interviews with informants, literature documents, and scientific research results. The interviewee was chosen purposively. Data collection techniques are

through the interview stage and literature study. Data analysis techniques are done by reducing data, presenting data, and drawing final conclusions. Result of the research show the existence of HMI control function in the form of complementary that is as media of society to convey aspiration to Metro city government. The function of *Cangkir Kamisan* as complementary is to activate various activities to fulfill the role of the State as public servant. As a substitute, HMI claims that they have not done activities outside the activities of the Metro government. The substitute function of *Cangkir Kamisan* are by forming green trash bank, Metro photography, music and documentary film which have never been encouraged by the government. The control function of HMI as counter-State is carried out by conducting a series of advocacy in the form of discussions, studies, and audiences to the government. While the control function of the *Cangkir Kamisan* as the counter-State is done by being a community facilitator in voicing their aspirations through discussion, or article writing.

Keywords : *Civil Society, Agenda Setting, Policy Analysis, Metro city vision.*

**ANALISIS PERAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) DAN
CANGKIR KAMISAN DALAM PENYUSUNAN AGENDA *SETTING*
TERHADAP PENAMBAHAN VISI MISI KOTA METRO**

Oleh

DITA PURNAMA

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

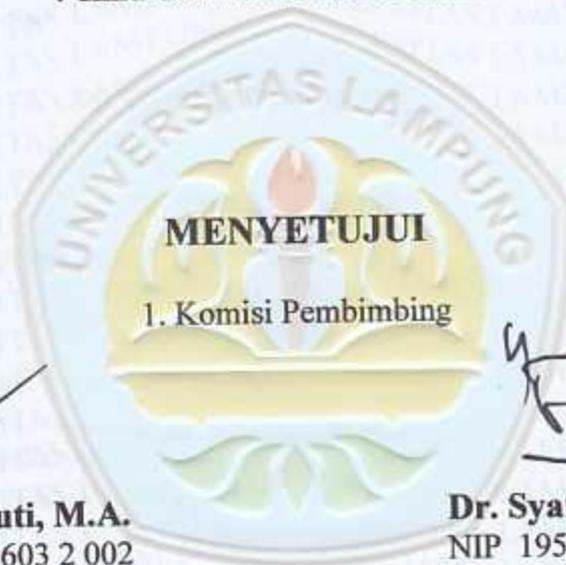
Judul Tesis : **ANALISIS PERAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) DAN CANGKIR KAMISAN DALAM PENYUSUNAN AGENDA *SETTING* TERHADAP PENAMBAHAN VISI MISI KOTA METRO 2016**

Nama Mahasiswa : **Dita Purnama**

No. Pokok Mahasiswa : **1526021006**

Program Studi : **Magister Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Dr. Ari Darmastuti, M.A.
NIP 19600416 198603 2 002

Dr. Syarif Makhya
NIP 19590803 198603 1 003

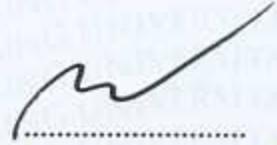
2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung

Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.
NIP 19601010 198603 1 006

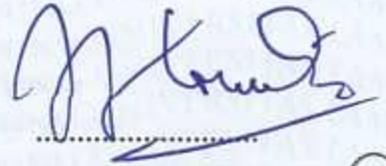
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

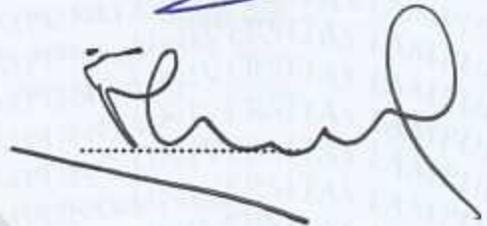
Ketua : **Dr. Ari Darmastuti, M.A.**



Penguji Utama : **Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.**



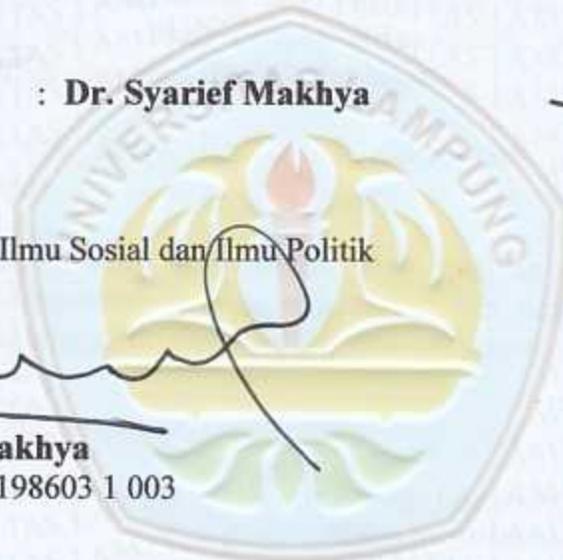
Sekretaris : **Dr. Syarief Makhya**



2. Dekan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarief Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003



Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Drs. Mustofa, M.A., Ph.D.
NIP. 19570101 198403 1 020

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **02 Mei 2018**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis dengan judul : **“Analisis Peran Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Cangkir Kamisan Dalam Penyusunan Agenda *Setting* Terhadap Penambahan Visi Misi Kota Metro 2016”** adalah hasil karya saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan tim Pembimbing dan Penguji dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya juga bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 09 Agustus 2018
Yang menyatakan,



DITA PURNAMA
NPM. 1526021006

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kota Metro, pada tanggal 14 Februari 1992. anak kedua dari lima bersaudara dari bapak Hi.Syafrudin dan HJ.Murniati.

Jenjang akademi dimulai dengan menyelesaikan pendidikan taman kanak-kanak (TK) Aisyah Metro pada tahun 1998, Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah 1 Metro, diselesaikan tahun 2004. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3 Metro pada tahun 2007, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Metro yang diselesaikan pada tahun 2010, S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung pada tahun 2015. Pada Tahun 2015 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung. dan selesai ditahun 2018.

MOTTO

“Allah won't leave you empty handed, He will always replace something lost with something greater and better. Insha Allah”

“Ikhlas itu. ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesali amal dan tenggelam dalam kesedihan”

“Lelah kan menghilang, marah kan terpendam, bila duka tidak dirasa itulah BAHAGIA”

(DITA PURNAMA)

PERSEMBAHAN

Maha Suci Allah dan Segala Puji Untuk-Nya, sejumlah makhluk-Nya,
Keridhaan diri-Nya, perhiasan ‘Asry-Nya dan sebanyak tinda kalimah-Nya,
Sang penguasa alam semesta beserta isinya.

Untaian huruf, kata dan kalimat berpadu dengan angka, menjadi sebuah bentuk karya
Bersama Tesis ini kupersembahkan untuk mereka yang ditakdirkan menjadi lambung
Kasih sayang yang tiada pernah bertemu tepi dan mengenal sebuah akhir.

Kedua orang tuaku tercinta, **Ayah H. Syafrudin** dan **Mama Hj Murniati** yang dalam sembah
sujudnya tiada henti selalu mendoakanku, memberi cinta dan kasih sayangnya, dan tiada
henti selalu membimbing dan mengarahkan adinda diperjuangan dunia menuju akhirat,
terimakasih banyak atas pengorbanan yang telah adinda terima, tidak ada yang dapat adinda
berikan, semoga Allah membalas kebaikan Ayah dan Mama selama ini.

Adik-adikku, Gita Tri Wahyuni, Niko Ardianto dan Okta Dinata Saputri, serta Keluarga
Besarku yang telah menjadi penyemangat, perhatian, dan penuh kasih sayang sehingga
penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmat, karunia dan kasih sayang-Nya lah sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“Analisis Peran Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Cangkir Kamisan Dalam Penyusunan Agenda Setting Terhadap Penambahan Visi Kota Metro 2016”** yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Ilmu Pemerintahan pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Tesis ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. Mustofa, M.A., Ph.D selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung,
2. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan FISIP Universitas Lampung sekaligus sebagai dosen pembimbing yang telah banyak memberikan wawasan ilmu dan motivasi,

3. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung, sekaligus sebagai dosen pembahas yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun,
4. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si. selaku Koordinator Sekretariat Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung,
5. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A. selaku dosen pembimbing utama yang telah banyak memberikan wawasan ilmu dan motivasi baik mengenai dunia akademisi maupun kehidupan,
6. Seluruh Jajaran Dosen Pengajar di Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung
7. Seluruh Staf Administrasi di Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung dan Karyawan TU Fisip Unila yang membantu dan melayani urusan administrasi perkuliahan,
8. Ketua HMI Cabang Kota Metro beserta jajaran anggota terima kasih atas bantuannya yang telah memberikan informasi dan data sehingga tesis ini dapat terselesaikan,
9. Masyarakat Cangkir Kamisan terima kasih atas bantuannya yang telah memberikan informasi dan data sehingga tesis ini dapat terselesaikan,
10. Kepala BAPPEDA dan seluruh jajaran anggota terimakasih atas bantuannya yang telah memberikan informasi dan data sehingga tesis ini dapat terselesaikan,
11. Kepada Orang Tua, Bapak H Syafrudin dan Ibu Hj Murniati yang selalu memberikan semangat untuk selalu menjadi yang terbaik dan yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan serta mendidik dengan penuh ketulusan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

12. Kepada Abang Ardito (Alm), Gita, Niko dan Okta terima kasih atas segala nasihat serta saran yang memotivasi untuk terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi,

13. Kepada seluruh mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan angkatan 2015, terima kasih sudah menjadi keluarga baru, dan terima kasih atas kebersamaannya semoga silaturahmi tetap terjaga dengan baik.

14. Semua responden yang telah memberikan informasi dan bantuan kepada Penulis,

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga tesis yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung,
Penulis

Dita Purnama

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|-------------|
| COVER DEPAN | i |
| ABSTRAK | ii |
| ABSTRACT | iii |
| COVER DALAM | iv |
| LEMBAR PERSETUJUAN | v |
| LEMBAR PENGESAHAN | vi |
| SURAT PERNYATAAN | vii |
| RIWAYAT HIDUP | viii |
| MOTTO | ix |
| PERSEMBAHAN | x |
| SANWACANA | xi |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR GAMBAR | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| | |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 18 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 19 |
| D. Manfaat Penelitian | 19 |
| | |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | 21 |
| A. Otonomi Daerah | 21 |
| B. <i>Civil Society</i> | 23 |
| C. Kebijakan Publik, Isu & Proses..... | 32 |
| D. Kerangka Pikir..... | 39 |

| | |
|---|------------|
| III. METODOLOGI PENELITIAN | 42 |
| A. Tipe Penelitian | 42 |
| B. Fokus Penelitian | 44 |
| C. Lokasi Penelitian | 45 |
| D. Jenis Data | 45 |
| E. Teknik PengumpulanData | 46 |
| F. Penentuan Informan | 47 |
| G. Teknik Pengolahan Data | 48 |
| H. Teknik Analisis Data | 49 |
| | |
| IV. GAMBARAN UMUM | 54 |
| A. Gambaran Umum HMI Kota Metro | 54 |
| B. Gambaran Umum Cangkir Kamisan Kota Metro..... | 56 |
| C. Gambaran Umum Kota Metro | 59 |
| | |
| V. HASIL DAN PEMBAHASAN | 69 |
| A. Peran HMI dan Cangkir Kamisan dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap Pemerintah Kota Metro | 69 |
| B. Kekuatan dan Akses HMI dan Cangkir Kamisan dalam Penyusunan <i>Agenda Setting</i> Kebijakan Publik di Kota Metro | 98 |
| C. Hal yang Melemahkan <i>Civil Society</i> dalam Upaya Melakukan Pengawasan Kebijakan | 105 |
| | |
| VI. KESIMPULAN | 108 |
| A. Kesimpulan..... | 108 |
| B. Saran..... | 111 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|---|----------------|
| 1. Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Pendek | 62 |
| 2. Peran HMI dan Cangkir Kamisan berdasarkan Fungsi Kontrol . | 73 |
| 3. Daftar Buku diterbitkan oleh Sai Wawai Publishing | 86 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|---|---------|
| 1. Kerangka Pikir..... | 41 |
| 2. Struktur Kepengurusan HMI..... | 56 |
| 3. Prof. Bart Dewancker, Lukman Hakim (Walikota Metro 2010-2015) dan Anak-Anak SD Muhammadiyah Metro | 81 |
| 4. Launching Bank Sampah Cangkir Hijau dan Kunjungan Warga Perancis ke Bank Sampah Cangkir Hijau | 92 |
| 5. Kegiatan Launching Mini Album Titik Temu dan <i>Metro Photography</i> | 94 |
| 6. Kegiatan Metro <i>Revival</i> Lampung Post dan CD Film Lawan Politik Uang | 96 |

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan suatu bentuk demokrasi dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan dalam hal mengurus dan mengelola sistem pemerintahan daerahnya secara mandiri. Sesuai dengan Amanat Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah kehadiran otonomi daerah ditujukan untuk memajukan masyarakat lokal yang pada masa sentralisasi belum tersentuh. Kehadiran masyarakat lokal menjadi faktor penyempurna suatu penyelenggaraan demokrasi, demokrasi dapat dikatakan sempurna apabila melibatkan semua elemen, dari pemerintah sampai dengan masyarakat, sehingga dapat diartikan bahwa dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah diperlukan adanya pengawasan oleh masyarakat lokal tersebut.

Kehidupan demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari peran serta masyarakat yang secara sadar untuk mau terlibat langsung dalam memainkan peran politiknya sebagai warga negara. Keterlibatan ini bukan semata-mata didorong karena motif kepentingan kelompok maupun pribadi, namun secara tidak langsung wujud keterlibatan tersebut adalah tindakan yang muncul dengan sendirinya akibat dari *problem* yang mengancam stabilitas politik,

ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini dipandang perlu untuk disikapi secara serius karena kehidupan demokrasi tidak dipandang secara sempit sebatas pada keterlibatan individu atau warga negara dalam memberikan hak suaranya ketika berlangsungnya pesta demokrasi dalam pemilu.

Pada segmen yang lebih luas, keterlibatan warga negara dapat dinilai sebagai suatu upaya menjalankan fungsi kontrolnya dalam mengawal pelaksanaan pemerintahan untuk mewujudkan *good governance*. Keterlibatan masyarakat inilah yang kemudian menciptakan ruang politik yang menjamin perilaku kesukarelaan, keswasembadaan dan kemandirian yang tinggi dalam menghadapi negara dan tentunya masih dalam sekat hukum dan nilai yang berlaku pada negara tersebut (Hikam, 1996: 3). Bentuk kemandirian politik inilah yang kemudian disebut dengan masyarakat sipil atau *civil society*, yakni sebuah ruang berdemokrasi bagi masyarakat yang tidak terkontaminasi dengan jejaring kelembagaan politik formal.

Menurut Tocqueville dalam Azra, dkk (2003: 3), *civil society* didefinisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisir dan bercirikan, antara lain: kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), dan keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Istilah *civil society* berasal dari bahasa latin yang berarti masyarakat. Kata *civil* pada akhirnya membentuk kata *civilitation* yang berarti peradaban maju. (Gellner, 1995). *Civil society* dapat diartikan

juga sebagai komunitas masyarakat kota, yakni masyarakat yang telah berperadaban maju.

Kemunculan *civil society* erat dengan peristiwa reformasi dimana *civil society* yang digunakan sebagai kontrol publik. Pelembagaan masyarakat di dalam suatu kelompok memberikan ruang kebebasan untuk bertindak secara aktif dalam wacana maupun praktiknya untuk disalurkan tanpa tekanan dari pemegang kekuasaan. Terlaksananya fungsi dan peran dari *civil society* dengan baik maka akan makin memperjelas dimensi kesejahteraan dan keadilan di masyarakat pada setiap fase pembangunan bangsa.

Kekuatan *civil society* sekali lagi terlembaga dalam pilar-pilar demokrasi, yang salah satunya terwujud dalam institusi yang memainkan fungsi *social control*. Lembaga-lembaga tersebut antara lain LSM, Pers, serta Organisasi Mahasiswa. Ketiga pilar tersebut memegang peranan penting dalam melaksanakan kontrol sosial dalam pemerintahan. Pada penelitian ini, pilar demokrasi yang berbentuk dalam lembaga *civil society* yang akan dikaji lebih mendalam adalah organisasi mahasiswa yang ada di Kota Metro.

Secara geografis, letak Kota Metro sangatlah strategis yaitu berada ditengah dan dikelilingi oleh Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah. Alhasil banyak masyarakat di sekitar Metro yang notabene secara administratif tinggal di Lampung Tengah dan Lampung Timur malah menjadi tempat untuk mengemban pendidikan. Tidak heran bahwa Kota Metro memiliki semboyan kota pendidikan. Sebagai kota pendidikan tentunya Kota

Metro memiliki banyak kumpulan masyarakat seperti HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dan Cangkir (Berbincang dan Berfikir) Kamisan.

Realitas saat ini berbicara soal fenomena *civil society*, khususnya di daerah Provinsi Lampung sebagaimana yang dilansir AntaraLampung.com menurut sumber Yayasan Satu Nama Bandar Lampung bahwa *civil society* di Lampung menghadapi tantangan internal yang dapat membuat mereka semakin melemah. Tantangan internal itu yakni kepemimpinan, manajemen, dan keberlangsungan finansial yang ikut melemahkan kerja demokrasi. Pada level lokal ada ancaman dari kekuatan orang-orang yang tidak menduduki kekuasaan politik namun ikut menentukan kebijakan-kebijakan politik. (<https://lampung.antaranews.com/berita/273499/masyarakat-sipil-lampung-hadapi-tantangan-internal>, di akses pada Januari 2017)

Dilihat dari fenomena tersebut maka dalam hal ini pemerintahan daerah membutuhkan penguatan *controlling* yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Tentunya hal tersebut dilakukan oleh lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat yang ada di wilayah pemerintahan tersebut. Sebagaimana yang sebelumnya dibahas bahwa fungsi sosial kontrol dari *civil society* akan terlihat dari bagaimana organisasi yang ada melaksanakan aktivitas politiknya.

Sebagai daerah otonom, roda pemerintahan Kota Metro tidak terlepas dari unsur-unsur masyarakat sipil yang terlembaga dalam organisasi mahasiswa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yaitu Himpunan mahasiswa Islam (HMI) komisariat cabang Metro Himpunan mahasiswa Islam (HMI) dan

aktivitas Cangkir Kamisan yang dilaksanakan dibawah komunitas Sai Wawai Institute dan Pojoksamber.com. Sebagai organisasi mahasiswa tertua tentunya secara basis HMI memiliki dominasi baik dari segi kekuatan politis yang dibarengi dengan kuantitas dan kualitas kader-kadernya. Sehingga dalam menjalankan fungsi kontrolnya HMI telah banyak mewarnai sejarah bangsa. Di Kota Metro seperti yang kita ketahui bahwa banyak berdiri Perguruan Tinggi Swasta yang dalam perkembangannya HMI cabang Metro juga menjaring kader-kadernya dihampir seluruh Perguruan Tinggi yang ada. Berbagai aktivitas *controlling* seperti demonstrasi dalam rangka menyikapi berbagai kebijakan daerah sampai skala nasional sering dilakukan. Begitupun dalam Forum Cangkir Kamisan yang disana juga melibatkan elemen mahasiswa yang tergabung dalam HMI.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dikenal sebagai organisasi kemahasiswaan tertua dan terbesar di Indonesia, telah banyak lika-liku perjalanan yang dilalui HMI, berbagai peristiwa penting dan bersejarah di negeri ini turut mewarnai perjalanan panjang HMI, setidaknya organisasi yang telah melahirkan banyak tokoh ini telah melawati tiga zaman untuk periode berbeda yaitu Orde lama, Orde baru dan Reformasi. HMI mulai saat berdiri hingga kini telah memiliki jumlah kader yang terhitung tidak sedikit, mulai dari kader aktif yang tersebar disetiap daerah di indonesia dan berhimpun disetiap cabangnya sampai dengan alumni yang telah mampu menduduki jabatan strategis mulai dari level yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Secara umum HMI memiliki andil yang cukup besar dalam kondisi sosial dan politik di Indonesia. HMI melaksanakan fungsi kontrol

sosialnya dengan mengandalkan potensi masa dan dapat digerakkan untuk melakukan *pressure* ataupun dukungan (Hasil wawancara HMI, 2017).

Nama besar HMI secara nasional tidak bisa dilepaskan dari peran cabang disetiap daerahnya dan juga peran komisariat disetiap cabangnya, termasuk cabang HMI di Kota Metro. Organisasi mahasiswa HMI Kota Metro telah berdiri sejak 35 tahun silam, yang menandakan bahwa usia organisasi yang tak muda lagi, selain itu angka 35 tahun mengindikasikan bahwa telah banyak hal yang dilakukan oleh organisasi ini untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan membantu masyarakat dalam mengawal dan mengontrol jalannya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Metro.

Tindakan HMI Kota Metro dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan mengawal pelaksanaan kebijakan pemerintah menunjukkan adanya kekuatan yang dimiliki oleh HMI. Kekuatan yang dimiliki HMI untuk melaksanakan fungsi dan peranannya, diantaranya; (1) HMI Kota Metro memiliki lima komisariat yang menjadi jantung pengkaderan HMI; (2) jumlah kader yang tersebar di setiap komisariat meningkat; (3) fasilitas berupa sekretariat yang memadai dan berlokasi di tempat strategis; (4) keberadaan alumni; dan (5) jumlah perguruan tinggi di Kota Metro yang mengusung tema kota pendidikan (Hasil wawancara HMI, 2017). Adanya kekuatan yang dimiliki oleh HMI Kota Metro tidak akan bermakna tatkala kader-kader, terlebih pengurus cabang dan komisariat tidak dapat meramunya secara baik.

Kota Metro yang mengusung jargon kota pendidikan menjadi pemantik bagi kader-kader HMI dalam menajamkan naluri intelektualnya, guna mendukung fungsi dan peranannya dalam mengawal dan mengawasi jalannya pelaksanaan kebijakan Kota Metro, terutama apa yang menjadi visi dan misi, yang seyogyanya menjadi fokus utama para *stakeholders* dalam memenuhinya. Berlandaskan tujuan HMI saat awal didirikan, yakni mempertahankan NKRI dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia dan menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam (Sitompul: 1976). Seiring dengan berkembangnya zaman, HMI melakukan berbagai transformasi agar dapat tetap relevan dalam perjuangan-perjuangan yang dilakukannya. Sampai saat ini HMI memiliki tujuan yakni terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdian yang bernaftaskan islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang di ridhoi Allah (AD/ART HMI Pasal 4).

Berbeda dengan HMI, Cangkir Kamisan bukanlah suatu bentuk lembaga formal di Kota Metro, melainkan salah satu kegiatan yang terdiri dari beberapa golongan (mahasiswa, jurnalistik, wiraswasta) berkumpul dan mendiskusikan hal-hal dan fenomena yang terjadi di Kota Metro yang bersifat publik dan dirasakan oleh masyarakat Kota Metro. Cangkir Kamisan tidak memiliki jabatan struktural maupun anggota tetap. Siapa saja yang ingin berdiskusi diperbolehkan mengikuti forum tersebut setiap hari kamis malam jumat (Hasil wawancara dengan Anggota Cangkir Kamisan 2017)..

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara awal, HMI dan Cangkir Kamisan merupakan suatu kelompok dan kegiatan yang berada diluar pemerintahan yang melakukan pengawasan terhadap setiap kebijakan pemerintah di Kota Metro, hal ini dapat dilihat dari seringnya kelompok tersebut melakukan forum diskusi membahas tentang visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Metro yang sudah tercapai dan yang belum terealisasikan. *Civil society* dimaknai sebagai ruang kebebasan publik dengan melakukan komunikasi yang berlandaskan kepentingan masyarakat luas.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dikatakan bahwa HMI dan Cangkir Kamisan di Kota Metro sudah melakukan hal tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya suatu bentuk nyata yang dilakukan oleh HMI sebagai *civil society* melalui aksinya yang bertujuan kepentingan masyarakat luas. Cangkir Kamisan juga merupakan wujud hidupnya pilar demokrasi dan berfungsinya lembaga masyarakat di Kota Metro dengan cara membuat forum dan membahas tentang isu-isu yang ada di Kota Metro.

Ratusan Masa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Metro, Lampung melakukan aksi damai Hari Sumpah Pemuda Ke-88 di halaman Pemerintah Kota (Pemkot) Metro, Jum'at (27/10). Dalam aksi tersebut, massa juga meminta agar instansi terkait mengungkap tuntas dan menghentikan transaksional jabatan di Kota Metro. Selain itu, massa menuntut isu nasional tentang dua tahun kinerja Presiden Jokowi, dan penuntasan kasus hukum penistaan agama oleh Ahok, selain itu massa juga meminta perjelas Visi-Misi pemegang kebijakan di Kota Metro, bersihkan pejabat korupsi, ungkap tuntas pungli, dan perbaiki penataan Kota. Ketua Pelaksana HMI Cabang Kota Metro M Rozi Fauji, mengatakan HMI cabang Kota Metro berunjuk rasa, guna mempertanyakan Visi Kota Metro sebagai kota pendidikan dan wisata keluarga dengan dasar ekonomi kerakyatan dan pembangunan partisipatif. "Visi Kota ini ternyata masih belum jelas, karena menjadikan

Kota Metro sebagai kota wisata keluarga tentulah kontraproduktif dengan upaya menciptakan kota ini sebagai kota pendidikan, belum lagi permasalahan pelayanan kesehatan, keamanan, serta tergerusnya pedagang kecil dengan para pemilik modal dengan menjamurnya toko modern,”. Menurutnya, tanpa disadari Visi dan Misi Kota Metro, telah dan akan melahirkan beberapa problem yang harus diselesaikan secara tegas. Kota Metro membutuhkan pemimpin bersih, yang bisa turun langsung melihat keadaan wilayah dan masyarakatnya. “Pemimpin harus mampu mengungkap serta menghentikan transaksional jabatan, dan pemimpin harus berani mengungkap pungli, serta pemimpin harus mampu melakukan perbaikan penataan Kota dengan mempertimbangkan beberapa aspeknya,” kata dia. HMI meminta kepada pejabat pemilik kebijakan tertinggi di Metro, agar mendengarkan aspirasi mereka. “Ini semua demi mewujudkan masyarakat yang beradab dan bermartabat. apabila aspirasi kami kali ini tidak didengar, kami akan siap melakukan unjuk rasa kembali, dengan jumlah yang lebih besar dari pada hari ini,” pungkasnya. (<http://www.gentamerah.com/2016/10/hmi-meminta-tangkap-transaksional.html>)

Berdasarkan pada diatas dapat dilihat bahwa HMI telah menjalankan fungsi kontrolnya sebagai *civil society*. Fokus utama pada penelitian ini adalah isu kebijakan penambahan visi di Kota Metro sebagai kota wisata keluarga. HMI sebagai organisasi intelektual berpendapat bahwa dengan dirumuskannya kebijakan tersebut maka akan menimbulkan permasalahan yang baru. Menurut HMI dalam laman berita tersebut kebijakan penambahan Visi Kota Metro justru akan mengurangi kesejahteraan masyarakat Metro. Hal ini disebabkan oleh terpecahnya fokus dari tujuan yang ingin dicapai oleh Kota Metro itu sendiri. Sebelumnya HMI melakukan aksi dengan menuntut konsistensi pemerintah Kota Metro yang memiliki Visi sebagai Kota Pendidikan. Akan tetapi hal tersebut tidak sejalan dengan realita yang terjadi. Pasalnya masih banyak masyarakat Kota Metro yang tidak memiliki kesempatan mengenyam pendidikan sekolah (<http://www.gentamerah.com/2016/10/hmi-meminta-tangkap-transaksional.html>).

Dengan demikian HMI berada pada posisi kontra terhadap kebijakan tersebut sehingga mengambil langkah-langkah penentangan seperti dengan melakukan aksi damai tersebut. HMI sebagai aktor *pressure group* berada pada garda terdepan di Kota Metro. Sementara itu Cangkir Kamisan memilih untuk membahas isu sosial dan politik lebih jauh dan terbuka. Maka HMI serta Cangkir Kamisan memiliki andil sebagai penggerak masa untuk turut mengawasi jalannya roda pemerintah Kota Metro.

Setiap penyelenggaraan pemerintahan tentunya membutuhkan pengawasan dari kelompok masyarakat. Seperti yang kita ketahui dalam sistem politik di Indonesia kita mengenalnya juga dengan istilah “*pressure group*” atau kelompok penekan yang sekiranya menjadi mitra suprastuktur politik dalam menjalankan roda pemerintahan. Munculnya suatu kebijakan tentunya tidak hanya dipengaruhi oleh infrastruktur pemerintahannya saja. Oleh sebab itu, dalam proses pembuatan kebijakan, hal yang sangat menentukan adalah dalam tahapan agenda *setting*.

Tahap penyusunan agenda atau biasa dikenal dengan sebutan agenda *setting* merupakan tahapan pengumpulan masalah-masalah yang menjadi isu publik menjadi satu kesatuan kedalam suatu agenda kebijakan yang akan dibahas oleh para pembuat kebijakan (Winarno: 2012). Agenda *setting* dalam penelitian ini akan difokuskan pada *civil society* yang melakukan tahapan pengumpulan masalah, menjadikan masalah tersebut menjadi isu publik yang akan disampaikan kepada para pembuat kebijakan. Dalam sudut pandang penelitian ini pemerintah bukan sebagai aktor utama dalam menjalankan

agenda *setting* melainkan peran dari *civil society* yakni HMI dan Cangkir Kamisan. Suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila dalam tahapan pembuatan kebijakan tersebut mengutamakan isu kesejahteraan masyarakat.

Fakta dilapangan saat ini kebijakan yang dibuat oleh Pairin-Johan selaku Wali Kota dan Wakil Walikota Kota Metro dipandang tidak mengutamakan kepentingan masyarakat, Kota Metro yang sampai saat ini memiliki slogan “Kota Pendidikan” tentunya diharapkan memiliki kebijakan yang memprioritaskan seputar dunia pendidikan. Faktanya belakangan terakhir ini banyak pelaku kejahatan dengan sasaran korban para pelajar seperti kasus pembunuhan dan pemerkosaan.

Kebijakan lain yang turut dijadikan sorotan masyarakat Kota Metro mengenai tata letak kota. Banyak masyarakat khususnya para pedagang mengeluh akan adanya renovasi pasar yang sedang terjadi. Peralnya selain harga sewa kontrak toko yang sangat tinggi dan tidak sesuai dengan pendapatan mereka, ada beberapa jenis dagangan yang tidak lagi diperbolehkan untuk memperpanjang kontraknya Kebijakan yang baru ini mewajibkan pedagang tersebut pindah ke pasar yang sangat jauh dari lokasi sebelumnya. Hal ini sangat mematkan kondisi perekonomian masyarakat (Hasil wawancara dengan masyarakat, 2017). Berkaitan dengan definisi kebijakan, dalam pembuatan agenda kebijakan haruslah melihat dari masalah-masalah masyarakat luas. Pendidikan dan ekonomi adalah 2 aspek besar yang seharusnya dijadikan isu maupun pertimbangan dalam proses pembuatan kebijakan.

Fenomena kekuatan *civil society*, dalam penelitian ini yaitu HMI dan Cangkir Kamisan merupakan *civil society* yang cukup aktif dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Seperti yang telah disampaikan fungsi *civil society* adalah sebagai komplementer, substitutor dan tandingan negara (Tocqueville dalam Azra, dkk, 2003: 3). Komplementer yang berarti *civil society* memiliki sejumlah kegiatan yang bertujuan memajukan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, substitutor yang berarti *civil society* yang melakukan serangkaian aktifitas yang tidak/belum dilakukan oleh negara, serta tandingan negara yakni HMI dan Cangkir Kamisan sebagai *civil society* tentunya diharapkan mampu memenuhi ketiga aspek tersebut sehingga setiap kebijakan yang dibuat merupakan hasil dari segala perwujudan kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini akan dibahas serangkaian upaya dari HMI dan Cangkir Kamisan dalam memaksimalkan ketiga fungsi *civil society* melalui agenda *setting* yang telah disampaikan sebelumnya.

Ada beberapa penelitian lain berupa tesis dan jurnal mengenai *civil society*, akan tetapi penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut.

1. Penelitain M. Nur Hasan tahun 2006 dengan judul, “*Visi Sosial dan Moral Politik NU dalam Pemberdayaan Civil Society*” (Tesis Ilmu Filsafat Universitas Indonesia).

Terdapat beberapa perbedaan tesis Nurhasan dengan penelitian ini:

Pertama, tesis tersebut membahas tentang perdagangan, sikap dan perilaku sosial politik Nahdatul Ulama (NU), pada periode kepemimpinan Abdurrahman Wahid di tahun 1984-1999, memiliki prinsip-prinsip dasar sosial yang dianut NU muncul sebagai kritik terhadap fenomena sosial politik dan implementasi otoritas negara oleh rezim Soeharto. Sementara dalam penelitian ini masalah yang diteliti adalah fenomena *civil society*, yakni terkait HMI dan Cangkir Kamisan dalam peran sertanya sebagai fungsi kontrol terhadap visi misi Kota Metro.

Kedua, dari segi teori, tesis Nurhasan menggunakan teori etika politik dari Aristoteles yang menerangkan bahwa etik politik merupakan cabang filsafat yang mengkaji secara kritis berbagai norma hukum dan penggunaan kekuasaan negara dari segi legitimasinya. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori *civil society* dari Burhanudin yang menerangkan bahwa *civil society* adalah wilayah-wilayah dalam kehidupan sosial yang terorganisasi dengan dicirikan beberapa hal, yaitu kesukarelaan, keswasembadaan, keswadayaan, dan keterikatan tinggi dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang dianut warganya.

Ketiga, metode penelitian yang digunakan oleh Nurhasan adalah metode penelitian mengenai masalah faktual, yaitu mengenai pandangan dasar mengenai sikap dan tindakan suatu komunitas. Sedangkan dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi.

2. Penelitian Adi Suryadi tahun 2009 dengan judul, “*Civil society di Indonesia: Study Kasus Petisi 50*” (Tesis Ilmu Politik Universitas Indonesia).

Perbedaan tesis Suryadi dengan penelitian ini dapat dilihat melalui 3 aspek:

Pertama, tesis tersebut membahas tentang eksistensi dan perkembangan petisi 50 sebagai *civil society* dalam politik di Indonesia. Sementara, dalam penelitian ini masalah yang diteliti adalah fenomena *civil society*, yang dalam hal ini adalah HMI dan Cangkir Kamisan dalam peranannya sebagai fungsi kontrol terhadap visi misi Kota Metro.

Kedua, teori yang digunakan dalam tesis Suryadi adalah teori Jean L. Choen yang menjelaskan *civil society* sebagai wilayah interaksi sosial yang didalamnya mencakup semua kelompok-kelompok sosial yang paling akrab (khususnya keluarga), asosiasi, gerakan kemasyarakatan dan berbagai wadah dan mobilisasi sendiri dan independen dalam kelembagaan maupun kegiatan. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori *civil society* dari Burhanudin yang menerangkan bahwa *civil society* adalah wilayah-wilayah dalam kehidupan sosial yang terorganisasi dengan dicirikan beberapa hal, yaitu kesukarelaan, keswasembadaan, keswadayaan, dan keterikatan tinggi dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang dianut warganya.

Ketiga, metode penelitian, tesis Suryadi menggunakan metode penelitian deskriptif analitik, yakni memberikan gambaran dan analisis tentang profil

petisi 50 sebagai elemen *civil society* dalam politik Indonesia. Sedangkan, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi.

3. Tesis Fathor Rosyid dengan judul, “*Dinamika Gerakan Sosial (Study Peran Intelektual dalam Melakukan Gerakan Sosial dengan Masyarakat Sipil Untuk Mendapatkan Pelayanan Listrik di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember)*” (Tesis Sosiologi Universitas Brawijaya)

Perbedaan tesis Fathor dengan penelitian ini yaitu:

Pertama, tesis tersebut membahas tentang dinamika gerakan sosial khususnya peran intelektual dalam melakukan gerakan sosial dengan masyarakat sipil untuk mendapatkan pelayanan listrik di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember). Sementara dalam penelitian ini masalah yang diteliti adalah fenomena *civil society*, yakni terkait HMI dan Cangkir Kamisan dalam peran sertanya sebagai fungsi kontrol terhadap visi misi Kota Metro.

Kedua, dari segi teori, tesis Fathor menggunakan teori gerakan intelektual organik dari Antonio Gramsci yang menjelaskan bahwa intelektual organik harus bisa mengorganisasi massa serta mempunyai koneksi dengan masyarakat dalam upaya melakukan gerakan sosial. Sementara, dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori *civil society* dari Burhanudin yang menerangkan bahwa *civil society* adalah wilayah-

wilayah dalam kehidupan sosial yang terorganisasi dengan dicirikan beberapa hal, yaitu kesukarelaan, keswasembadaan, keswadayaan, dan keterikatan tinggi dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang dianut warganya.

4. Penelitian Erman I. Rahim dengan judul, "*Partisipasi dalam Persepektif Kebijakan Publik*" (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo)

Terdapat beberapa perbedaan tesis Erman dengan penelitian ini:

Pertama, tesis tersebut membahas tentang pelaksanaan partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa partisipasi publik merupakan komponen yang penting untuk membentuk dan mengimplementasikan suatu kebijakan publik. Sementara dalam penelitian ini masalah yang diteliti adalah fenomena *civil society*, yakni terkait HMI dan Cangkir Kamisan dalam peran sertanya sebagai fungsi kontrol terhadap visi misi Kota Metro.

Kedua, dari segi teori, tesis Erman menggunakan konsep partisipasi publik dari Philips M. Hadjon bahwa konsep partisipasi publik berkaitan dengan konsep keterbukaan. Hal ini menjelaskan bahwa tanpa keterbukaan pemerintahan tidak mungkin masyarakat dapat melakukan peran serta dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori *civil society* dari Burhanudin yang menerangkan bahwa *civil society* adalah wilayah-wilayah dalam kehidupan sosial yang terorganisasi dengan dicirikan beberapa hal, yaitu

kesukarelaan, keswasembadaan, keswadayaan, dan keterikatan tinggi dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang dianut warganya.

5. Penelitian David B.W. Pandie yang menulis tentang, "*Dinamika Studi Kebijakan Publik dalam Dimensi Ekonomi-Politik*" (Ilmu Administrasi Publik Universitas Nusa Tenggara)

Perbedaan tesis David dengan penelitian ini yaitu *pertama*, tesis tersebut membahas tentang penataan mendasar dalam sistem kebijakan publik daerah pada era desentralisasi. Hal ini dikarenakan ekspektasi rakyat terhadap adanya desentralisasi sangat tinggi tetapi pemerintah daerah tidak memiliki kompetensi dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang mandiri dalam bidang pelayanan publik maupun infrastruktur. Sementara dalam penelitian ini masalah yang diteliti adalah fenomena *civil society*, yakni terkait HMI dan Cangkir Kamisan dalam peran sertanya sebagai fungsi kontrol terhadap visi misi Kota Metro.

Kedua, dari segi teori, tesis David menggunakan dua pendekatan dalam mendesain kebijakan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Rondinelli, Mc Cullough dan Johnson yaitu pendekatan *public choice* dan *public policy* dalam konteks administrasi. Sementara, dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori *civil society* dari Burhanudin yang menerangkan bahwa *civil society* adalah wilayah-wilayah dalam kehidupan sosial yang terorganisasi dengan dicirikan beberapa hal, yaitu kesukarelaan, keswasembadaan, keswadayaan, dan

keterikatan tinggi dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang dianut warganya.

Ketiga, pada metode penelitian David, peneliti mengintegrasikan dua pendekatan yang digunakan dalam bentuk deksripsi yang bersifat teoritik. Sedangkan dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Hal yang dianggap menarik oleh peneliti untuk diteliti lebih lanjut adalah dengan adanya HMI dan Cangkir Kamisan yang terus aktif melakukan fungsi kontrol terhadap segala sistem pemerintahan, apakah akan mempengaruhi terhadap proses pembuatan kebijakan publik yang akan mengacu pada isu-isu dan fenomena mayoritas untuk kesejahteraan masyarakat Kota Metro.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran HMI dan Cangkir Kamisan dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap Pemerintah Kota Metro?
2. Bagaimana kekuatan dan akses HMI dan Cangkir Kamisan dalam penyusunan *agenda setting* kebijakan publik di Kota Metro?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan peran HMI dan Cangkir Kamisan dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap Pemerintah Kota Metro.
2. Untuk menganalisis kekuatan dan akses HMI & Cangkir Kamisan dalam penyusunan agenda setting kebijakan publik di Kota Metro.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis.

Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis sebagai berikut.

- a. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu *civil society* khususnya.
- b. Dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan ilmu yang terkait dalam masalah tersebut. Artinya, setiap hasil yang didapatkan dari penelitian ini bisa dikembangkan menjadi suatu ilmu yang terkonsep yang nantinya dapat dijadikan bahan acuan pengembangan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis.

Adapun manfaat penelitian secara praktis yaitu sebagai berikut.

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran atau masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi HMI dan Cangkir Kamisan yang termaksud *civil society* yang seharusnya.
- b. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang munculnya HMI dan Cangkir Kamisan sebagai *civil society* yang dapat mempengaruhi sistem pembuatan kebijakan pemerintah khususnya di Kota Metro.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Otonomi daerah juga dapat disebut dengan desentralisasi itu sendiri, mempersoalkan pembagian kewenangan kepada organ-organ penyelenggara negara, otonomi menyangkut hak yang mengikuti pembagian wewenang tersebut.

Istilah otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani yaitu *outus* yang berarti sendiri dan *nomos* berarti undang-undang. Menurut Tim Fisipol UGM (1991: 17), terdapat 4 unsur otonomi daerah, yaitu:

1. Memiliki perangkat pemerintah sendiri yang ditandai dengan adanya kepala daerah, DPRD, dan pegawai daerah;
2. Memiliki urusan rumah tangga sendiri yang ditandai dengan adanya dinas-dinas daerah;
3. Memiliki sumber keuangan sendiri yang ditandai dengan adanya pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah dan pendapatan dinas-dinas daerah.

4. Memiliki kewenangan untuk inisiatif sendiri (diluar dari instruksi dari pemerintahan pusat atau atasan) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi (Tim Fisipol UGM, 1991: 17).

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Hal ini berguna untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, dan untuk dapat mencapai hal tersebut, maka titik berat otonomi diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

Lebih lanjut di dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 34 juga menyebutkan adanya partisipasi masyarakat bahwa didalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dengan memberi kesempatan untuk melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pembangunan daerah. Telah disinggung bahwa otonomi daerah membuka kesempatan terhadap aktor-aktor lokal untuk dapat ikut serta dalam rangka memajukan daerahnya. Hal ini dibuktikan dengan menjamurnya *civil society*.

B. *Civil Society*

1. Definisi *Civil Society*

Konsep *civil society* memiliki pengertian yang beragam sesuai dengan sudut pandang masing-masing tokoh yang memberikan penekanan berbeda satu sama lain. Sebagian ada yang menggunakan pendekatan Hegelian, Gramscian dan sebagiannya lagi menggunakan pemahaman Tocquevillian. Bagi penganut paham Hegelian lebih mementingkan pada pentingnya pemberdayaan kelas menengah dalam suatu masyarakat, terutama hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan sektor ekonomi menuju pembangunan yang kuat (Tim ICCE UIN Jakarta 2003: 248-249)

Sementara itu, Tocqueville dalam Azra, dkk (2003: 3), *civil society* didefinisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisir dan bercirikan, antara lain: kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), dan keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Selanjutnya, Hegel dalam Rahardjo (1999: 139) melihat *civil society* itu bukan satu-satunya yang dibentuk dalam perjanjian kemasyarakatan (*social contract*). Dengan kata lain, *civil society* adalah salah satu bagian tatanan politik (*political order*) secara keseluruhan, di mana bagian dari tatanan politik yang lain adalah negara.

Hikam (1996: 200) sebagai sebuah ruang politik, *civil society* adalah suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan, dan refleksi

mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi material, dan tidak terserap di dalam jaringan-jaringan kelembagaan-kelembagaan politik resmi. Di dalamnya tersirat pentingnya suatu ruang publik yang bebas (*the free public sphere*) sebagai tempat di mana transaksi komunikasi yang bebas bisa dilakukan oleh warga setempat. Habermas dan Cardoso dalam Hikam (1996: 200) melihat *civil society* sebagai jaringan pengelompokan dan asosiasi yang mencakup mulai dari keluarga, organisasi sukarela, sampai pada organisasi yang mungkin di bawah bentukan negara tetapi berperan sebagai perantara antara negara dan individu, pribadi dan publik.

Lebih lanjut, Azra, dkk (2003: 125) melihat *civil society* merupakan kekuatan positif di luar kekuatan negara, partai politik, dan bisnis (the economy) yang bisa menumbuhkan kesadaran kritis di kalangan masyarakat bahwa negara bukan pusat dari segalanya dalam kehidupan kita. Sedangkan Nurcholish Madjid dalam Azra, dkk (2003: 62) menjelaskan bahwa *civil society* adalah “rumah” di mana berbagai asosiasi, perkumpulan, serikat kerja, federasi, dan partai politik akan menjadi perisai atau pelindung antara masyarakat dan negara.

Dari pengertian *civil society* di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *civil society* adalah wilayah atau ruang bagi berbagai organisasi/asosiasi yang terorganisir dibuat oleh masyarakat di luar pengaruh negara sebagai ruang publik yang bebas. *Civil society* dapat diwujudkan dalam wadah sosial politik dalam masyarakat, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), partai politik, organisasi massa, dan lain-lain.

2. Tipologi *Civil society*

Istilah *civil society* berasal dari bahasa latin *societes civiles* yang mula-mula dipakai oleh Cicero (Rahardjo: 1999) 106-43 SM dalam seorang orator politisi dan filsof roma. Sejak saat itu sampai dengan abad ke-18, pengertian *civil society* masih disamakan dengan negara, yakni sekelompok masyarakat yang mendominasi seluruh kelompok lain. Rentan waktu, Thomas Hobes (1588-1679), John Locke (1632-1704) dan Jean Jacques Rousseau (1712-1778) kembali menghidupkan dan mengembangkan istilah *civil society* masyarakat dan politik (Hardiman 2010: 201).

Hobbes misalnya berpendapat bahwa perjanjian masyarakat diadakan oleh individu-individu untuk membentuk suatu masyarakat politik atau negara. Locke mendefinisikan masyarakat sipil sebagai masyarakat politik yang mana dihadapkan dengan keadaan alami sekelompok manusia. Masyarakat politik itu sendiri menurut Rousseau yang senada dengan Hobbes, merupakan hasil dari suatu kontrak sosial. Hegel (1770-1831) yang beraliran idealis menyatakan *civil society* tidak dapat dibiarkan tanpa terkontrol. Ia justru memerlukan berbagai macam aturan dan pembatasan melalui kontrol hukum, administrasi dan politik. Karl Marx (1818-1883) sependapat dengan Hegel dalam melihat *civil society* sebagai masyarakat borjuis (Hardiman, 2010: 201).

Hegel menganggap hanya melalui negara, kepentingan-kepentingan masyarakat yang universal dan mengandung potensi potensi konflik bisa

terselesaikan, Marx beranggapan sebaliknya dimana ia menganggap negara tak lain sebagai badan pelaksana kepentingan kaum borjuis (Hardiman, 2010: 201). Jadi, kekuasaan politik yang rasional menuntut keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan politik hanya dimungkinkan oleh adanya diskusi publik yang kritis dalam suatu wilayah sosial yang bebas dari sensor dan dominasi.

Dunia publik merupakan mediasi antara negara dan masyarakat wilayah tumbuhnya lingkungan dan suasana komunikatif yang memungkinkan demokrasi dalam masyarakat. Dunia publik adalah wilayah kehidupan sosial yang memungkinkan semua warga masyarakat untuk membentuk opini publik. Setiap pribadi dalam situasi itu memiliki jaminan untuk berkumpul dan berserikat secara bebas serta menyatakan atau mengumumkan opini mereka secara bebas.

3. Ciri-Ciri *Civil society*

Civil society mempunyai prinsip pokok pluralism, toleransi dan hak asasi. Sebagai bangsa yang pluralis dan majemuk, model *civil society* merupakan tipe ideal suatu masyarakat Indonesia demi tercapainya integritas sosial bahkan nasional. *Civil society* memiliki beragam karakteristik/ciri-ciri baik itu secara umum maupun pendapat para ahli. Adapun ciri-ciri baik sebagai berikut.

1. Diakui semangat pluralisme, yang berarti pluralisme menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dielakan, sehingga pluralitas telah dapat menjadi suatu kaedah yang abadi.

2. Sikap toleransi antara sesama agama dan umat agama lain, sikap toleran ialah sikap yang suka mendengar, menghargai pendapat dan pendirian orang lain.
3. Tegaknya prinsip demokrasi. demokrasi yang dimaksud tidak sekedar kebebasan dan persaingan, demokrasi juga pilihan untuk bersama-sama membangun dan memperjuangkan masyarakat untuk semakin sejahtera.

Hal ini senada dengan ciri-ciri/karakteristik *civil society* (Bahmuller: 1997), yakni sebagai berikut:

1. Terintegrasi individu-individu dan kelompok –kelompok eksklusif ke dalam masyarakat dengan kontak sosial dan aliansi sosial.
2. Menyebarkan kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif.
3. Terjembatannya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi *volunter* mampu memberikan masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah.
4. Meluasnya kesetiaan dan kepercayaan sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri.
5. Adanya kebebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial yang persefektif (Bahmuller: 1997).

Lebih lanjut, Azra, dkk (2003: 211) menyatakan bahwa *civil society* berpijak pada prinsip bahwa masyarakat (*community*), pasar (*market*), dan

negara (*state*) adalah bagian yang harus saling mendukung dan mengawasi. Artinya masyarakat memenuhi kewajibannya untuk “taat” kepada negara dengan membayar pajak, dan lain-lain, demikian halnya negara juga harus memenuhi kewajibannya dalam melayani masyarakat. Apabila terjadi ketimpangan dari salah satunya maka praktek good governance tidak akan terwujud.

Selain itu, menurut Azra, dkk (2003: 207) *civil society* dibagi menjadi dua jenis berdasarkan karakteristiknya yaitu pertama, Identity based *civil society*, yaitu *civil society* yang basisnya adalah identitas, penekanan pada suatu identitas yang sifatnya partikular. Kedua, Interest based *civil society*, yaitu *civil society* yang basis sosialnya adalah kepentingan, tipe ini merupakan bagian yang integral dari perubahan masyarakat urban.

4. Syarat Terbentuknya *Civil society*

Pada dasarnya terbentuknya *civil society* memiliki beberapa tahapan, elemen dasar terbentuknya *civil society* menurut Rasyid dalam Tilaar (2002 : 63) adalah sebagai berikut:

- 1) Masyarakat yang memiliki moral dan peradaban yang unggul, menghargai persamaan dan perbedaan, keadilan, musyawarah, demokrasi.
- 2) Masyarakat yang tidak bergantung pada pemerintah pada sektor ekonomi.
- 3) Tumbuhnya intelektualitas yang memiliki komitmen *independent* dan;

- 4) Bergesernya budaya berpola (*pattern*) menjadi budaya yang lebih modern dan lebih *independent* (Rasyid dalam Tilaar, 2003: 63)

Barnadib dalam Tilaar (2002 : 67-68) juga mengemukakan adanya empat syarat terbentuknya *civil society*, yakni sebagai berikut:

- 1) Pemahaman yang sama, artinya diperlukan pemahaman bersama di kalangan masyarakat tentang apa dan bagaimana *civil society*.
- 2) Keyakinan dan saling percaya diri, artinya perlu ditumbuhkan dan dikondisikan keyakinan di masyarakat, bahwa *civil society* merupakan masyarakat yang ideal.
- 3) Satu hati dan saling tergantung, artinya kondisi kesepakatan, satu hati dan kebersamaan dalam menentukan arah kehidupan yang di cita-citakan.
- 4) Persamaan pandangan tentang tujuan dan misi (Barnadib dalam Tilaar, 2003: 67-68).

Beberapa unsur pokok yang harus dimiliki dalam pembentukan *civil society* antara lain meliputi: wilayah publik yang bebas (Free Public Shere), demokrasi, toleransi, kemajemukan, dan keadilan sosial Tim ICCE UIN Jakarta, 2003: 279-290).

1) *Free Public Sphere*

Pada unsur pertama yaitu wilayah publik yang bebas, ruang public ini diharapkan mampu memberikan ruang pada setiap warga negara untuk dapat memiliki posisi dan hak serta kebebasan yang sama dalam

mengemukakan pendapat untuk melakukan transaksi sosial dan politik tanpa rasa takut dan terancam oleh kekuatan di luar *civil society*.

2) Demokrasi

Demokrasi adalah prasyarat mutlak lainnya bagi keberadaan *civil society* yang murni. Tanpa demokrasi, *civil society* tidak mungkin terwujud. Demokratis merupakan satu entitas yang menjadi penegak wacana masyarakat madani dalam menjalani kehidupan, warga Negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya, termasuk dalam berinteraksi dengan lingkungannya

3) Toleran

Toleran merupakan sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Toleransi ini memungkinkan akan adanya kesadaran masing-masing individu untuk menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lain yang berbeda.

4) Pluralisme

Sebagai sebuah prasyarat penegakan masyarakat madani, maka pluralisme harus dipahami secara mengakar dengan menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang menghargai dan menerima kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pluralisme tidak bisa dipahami hanya dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk, tetapi harus disertai dengan sikap yang

tulus untuk menerima kenyataan pluralisme itu sebagai bernilai positif, merupakan rahmat Tuhan.

- 5) Pada bagian akhir dari unsur pokok *civil society* adalah adanya suatu keadilan sosial bagi seluruh warga negara, di mana terdapat suatu keseimbangan dan pembagian yang proporsional atas hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan, baik kehidupan ekonomi, politik, pengetahuan, dan kesempatan. Dengan ini bisa dikatakan bahwa *civil society* merupakan keadaan di mana hilangnya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan yang dilakukan oleh sekelompok atau golongan tertentu.
(Tim ICCE UIN Jakarta, 2003: 279-290)

Civil society bisa mewujud pada organisasi kemasyarakatan seperti, asosiasi *volunter* dan masyarakat, LSM, paguyuban, perhimpunan hobi olahraga, budaya, HMI dan Cangkir Kamisan

5. Fungsi *Civil society*

Melihat hubungan masyarakat dengan negara, *civil society* dianggap memiliki tiga fungsi (Azra, dkk 2003: 178) pertama, sebagai komplementer dimana elemen-elemen *civil society* mempunyai aktivitas memajukan kesejahteraan dengan memajukan kegiatan yang ditujukan untuk melengkapi peran negara sebagai pelayan publik. Kedua, sebagai substitutor. Artinya kalangan *civil society* melakukan serangkaian aktivitas yang belum/tidak dilakukan negara dalam kaitannya sebagai institusi yang

melayani kepentingan masyarakat luas. Ketiga, sebagai kekuatan tandingan negara sebagai contoh melakukan advokasi, pendampingan, litigasi dan lainnya.

C. Kebijakan Publik, Isu & Proses

Istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka kebijakan memiliki poin-poin yang harus difahami (Wahab, 2008: 40-50):

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan.
- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi.
- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan.
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan.
- e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai.
- f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit.
- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu.
- h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi.
- i. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah.
- j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif (Wahab, 2008: 40-50).

Pada dasarnya istilah kebijakan digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (seorang pejabat, kelompok, lembaga pemerintahan) atau aktor dalam suatu bidang kajian tertentu (Rusli, 2013: 31). Lebih lanjut Rusli (2013: 31) mengatakan bahwa dalam keseharian atau praktik kehidupan penggunaan istilah kebijakan sering dipertukarkan secara berbauran dengan istilah, tujuan, program, keputusan, standar, proposal dan *grand design*.

Edward dan Sharkansky dalam Kusumanegara (2011: 4) menjelaskan bahwa yang dimaksud kebijakan publik adalah apa yang dikatakan dan dilakukan pemerintah, mencakup tujuan-tujuan, program pemerintah, pelaksanaan niat dan peraturan. Sejalan dengan itu, *Thomas R. Dye* dalam Winarno (2012: 22) mendefinisikan kebijakan publik sebagai apa yang dilakukan pemerintah, bagaimana mengerjakannya, mengapa perlu dikerjakan dan perbedaan apa yang dibuat. Lebih lanjut, *Thomas R. Dye* berpandangan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli di atas mengenai pengertian kebijakan publik, maka dapat disimpulkan kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan tersebut diartikan baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mempunyai tujuan tertentu dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

1. Tahapan Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Kebijakan dibuat untuk mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat (*public*), biasanya suatu masalah sebelum masuk ke dalam agenda kebijakan, masalah tersebut menjadi isu terlebih dahulu. Isu, dalam hal ini isu kebijakan, tidak hanya mengandung ketidaksepakatan mengenai arah tindakan aktual dan potensial, tetapi juga mencerminkan pertentangan pandangan mengenai sifat masalah itu sendiri, sehingga isu kebijakan merupakan hasil dari perdebatan tentang definisi, eksplanasi dan evaluasi masalah (Winarno, 2012 : 82). Adapun proses atau tahapan kebijakan publik selanjutnya setelah masalah yang ada telah menjadi isu kebijakan, antara lain sebagai berikut (Winarno, 2012 : 36):

a. Tahap Penyusunan Agenda

Mengumpulkan masalah-masalah yang menjadi isu publik menjadi satu kesatuan kedalam suatu agenda kebijakan yang akan dibahas, oleh para pembuat kebijakan. Pada tahap ini masalah-masalah yang dikumpulkan akan dipilih sesuai dengan kesepakatan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan antar pembuat kebijakan (Winarno, 2012 : 36).

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah yang telah

dikumpulkan didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai macam alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Seluruh alternatif kebijakan akan bersaing untuk dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah (Winarno, 2012 : 36).

c. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak di implementasikan. Keputusan program yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah yang ada harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementators*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana (Winarno, 2012 : 37).

d. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan diambil atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik yang pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, dalam hal ini memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu,

ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk meminta apakah kebijakan publik telah diraih dampak yang diinginkan (Winarno, 2012 : 37).

Tindakan kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, dan proses selanjutnya adalah evaluasi terhadap implementasi, kinerja, dan dampak kebijakan. Hasil evaluasi ini bermanfaat bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan lebih berhasil (Subarsono, 2012 : 12). Adapun mengenai isu dan proses yang sedang terjadi adalah berawal dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) selaku *civil society* di Kota Metro yang sedang menggelarkan aksi damai peringatan hari sumpah pemuda dengan melakukan orasi serta membentangkan poster dan spanduk berisi butir-butir isi sumpah pemuda. Terdapat tujuh tuntutan HMI kepada Pemerintah Kota Metro yang terdiri dari:

1. Perjelas Visi dan Misi pemegang kebijakan di Kota Metro
2. Mengungkap tuntas dan menghentikan transaksional jabatan di Pemerintah Kota Metro
3. Bersihkan pejabat korup
4. Ungkap tuntas pungutan liar
5. Melakukan perbaikan penataan kota

Serta dua tambahan tuntutan isu nasional yang meliputi:

1. Penambahan lapangan kerja
2. Penuntasan kasus hukum ihwal penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok

2. *Agenda Setting*

Gagasan pemikiran *agenda setting* sesungguhnya sudah mulai muncul pada awal tahun 1920-an melalui pemikiran Walter Lippmann (Diba: 2014: 168). dalam tulisannya yang berjudul “*The World Outside and the pictures in our Heads*” Dalam pembuka bab yang berjudul *Public Opinion*, Lippman sudah menyiratkan ide *agenda setting* meski ia menyebutnya dengan istilah yang berbeda. Tesisnya adalah bahwa media berita, yang menjadi jendela kita ke dunia luas di luar pengalaman kita secara langsung, telah menentukan peta kognitif kita tentang dunia tersebut, sehingga menurutnya, opini publik bukanlah respon terhadap lingkungan melainkan respon terhadap lingkungan semu yang dikonstruksi oleh media. (Diba: 2014: 168).

Pemikiran Lippman tersebut kemudian mendapat dukungan dari McCombs & Shaw (1972) dalam (Diba: 2014: 169). yang menyatakan bahwa informasi yang diberikan media berita memainkan peranan yang penting dalam mengkonstruksi gambaran seseorang tentang realitas. Hipotesis sentralnya adalah bahwa media massa telah menyusun agenda dengan memberikan penonjolan pada isu-isu tertentu. Isu-isu tersebut kemudian diberi penekanan oleh media sehingga akan dianggap sebagai sesuatu yang penting oleh anggota publik. Dengan kata lain, isu yang dianggap penting oleh media juga akan dianggap penting oleh publik. Inilah yang disebut sebagai pengaruh *agenda setting* (Diba: 2014: 169).

Kunci dari *agenda setting* adalah penentuan porsi atas suatu isu atau peristiwa dalam proses *gate keeping*. Pembentukan persepsi publik dapat

dusahakan media dengan memberikan porsi pada setiap masalah atau isu disekitar khalayak, misalnya dengan menonjolkan suatu isu atau peristiwa tertentu dalam sajian media. Perbedaan porsi penyajian tersebut menyiratkan perbedaan atensi, kemudian akan memberikan pengaruh pada kognisi (pengetahuan dan citra) suatu peristiwa atau isu di mata khalayak.

Media massa dalam pendapat Charles Wright (1992: 20), melakukan seleksi tentang apa yang disajikan pada khalayak dan mengarahkan khalayak bereaksi terhadap suatu isu atau peristiwa yang diberitakan. Media massa menurut Wright memiliki kemampuan mengarahkan isu atau peristiwa untuk diterima khalayak dan diterima sebagai sebuah isu yang penting atau yang disebut dengan *agenda setting*.

Agenda setting, penonjolan isu-isu tertentu oleh media massa tidak lepas dari proses seleksi media yang melewati sejumlah pintu (*gates*), proses seleksi ini bisa dipegang oleh individu atau sekelompok orang yang nantinya akan memutuskan berita layak muat, mereka inilah yang memainkan peran dalam membentuk realitas yang ada di khalayak, *gate keeper* media massa biasanya akan menentukan bobot penyajian isu berdasarkan besarnya ruang yang disediakan, penonjolan berita (melalui *headline*, lokasi penempatan halaman) dan cara isu tersebut dibahas secara detail atau umum.

Agenda setting berangkat dari dua asumsi pokok yakni bahwa media tidak merefleksikan realitas sepenuhnya, dia hanya menyeleksi dan membentuknya. Kemudian penonjolan isu oleh media dalam kurun waktu

tertentu akan mempengaruhi publik, dimana publik akan menganggap isu tersebut lebih menonjol daripada isu yang lain (Weaver, dkk, 1981 : 3-4).

D. Kerangka Pikir

HMI dan Cangkir Kamisan adalah kelompok *civil society* yang berada di daerah Kota Metro. Sebagai suatu kelompok yang memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, HMI dan Cangkir Kamisan melakukan tugas dan fungsinya. Salah satu tugas dan fungsinya adalah dengan melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah Kota Metro. Penelitian ini akan mengacu terhadap fenomena kekuatan *civil society* dalam melakukan fungsinya yaitu pengawasan terhadap kebijakan pemerintah Kota Metro pada tahun 2016.

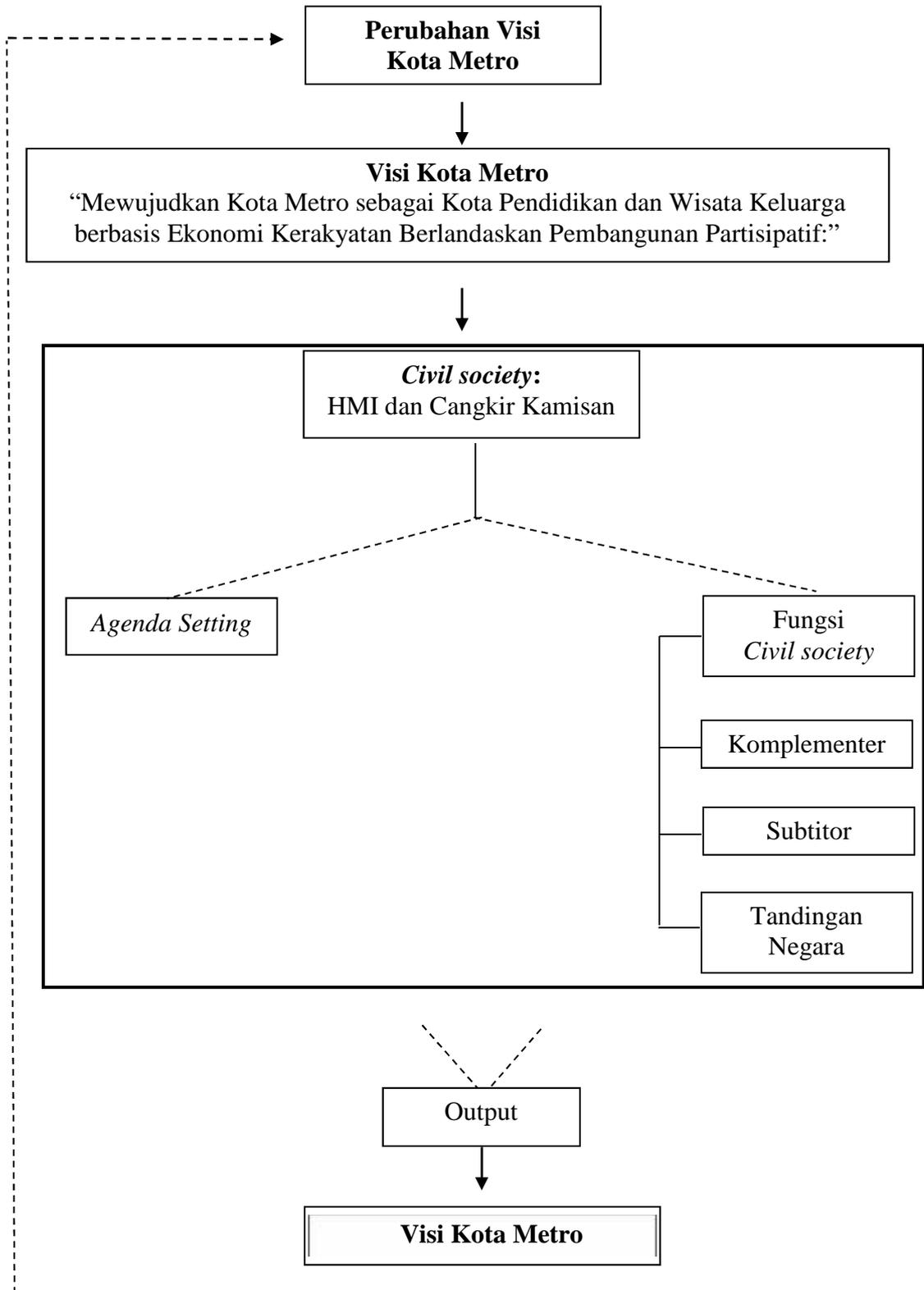
Mengacu kepada teori fungsi *civil society* yang dikemukakan oleh (Azra, dkk 2003: 178) pertama, sebagai komplementer dimana elemen-elemen *civil society* mempunyai aktivitas memajukan kesejahteraan dengan memajukan kegiatan yang ditujukan untuk melengkapi peran negara sebagai pelayan publik. Kedua, sebagai substitutor artinya kalangan *civil society* melakukan serangkaian aktivitas yang belum/tidak dilakukan negara dalam kaitannya sebagai institusi yang melayani kepentingan masyarakat luas. Ketiga, sebagai kekuatan tandingan negara sebagai contoh melakukan advokasi, pendampingan, ligitasi dan lainnya.

Selain itu, berdasarkan pada teori *agenda setting* yang dikemukakan oleh Lippman (Diba: 2014: 168, bahwa dalam proses pengambilan kebijakan

dipengaruhi oleh adanya pembentukan persepsi publik yang dibentuk oleh media atau penekanan terhadap suatu isu tertentu akan memberikan pengaruh pada kognisi (pengetahuan dan citra) suatu peristiwa atau isu di mata khalayak.

Dengan memperhatikan hal tersebut, maka HMI dan Cangkir Kamisan turut memanfaatkan media sebagai pembentuk *agenda setting* dalam hal ini adalah media massa lokal Kota Metro oleh kedua *civil society* dalam melakukan fungsi dan tugas pengawasannya terhadap pembentukan kebijakan oleh pemerintah. Selain penggunaan media, peneliti juga akan memperhatikan upaya lain dari HMI dan Cangkir Kamisan dalam menonjolkan sebuah permasalahan untuk mengkonstruksi persepsi khalayak sehingga akan berpengaruh pada kebijakan pemerintah kota Metro.

Hal tersebut merupakan bagian dari agenda *setting* oleh *civil society* yang akan dibahas dalam penelitian tesis ini. Pembahasan agenda *setting* oleh *civil society* akan diiringi dengan penjabaran fungsi HMI dan Cangkir Kamisan sebagai *civil society* yang ada di kota Metro. Sehingga, dengan itu dapat terlihat kekuatan HMI dan Cangkir Kamisan dalam penyusunan kebijakan publik di Kota Metro.



Gambar 1. Kerangka Pikir
Sumber: Hasil olahan peneliti

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif (Djunaidi: 2008). Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kualifikasi. Penelitian deskriptif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata yang sedang berlangsung. Tujuan utama penggunaan metode ini adalah untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara waktu berjalan pada saat penelitian dilakukan, dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.

Penelitian kualitatif merupakan sebuah konsep keseluruhan untuk mendapatkan jawaban-jawaban tertentu yang dilakukan dengan menghimpun data ke dalam keadaan yang sewajarnya dan mempergunakan cara bekerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak kehilangan sifat alamiahnya. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial dan hubungan kekerabatannya.

Pada penelitian kualitatif, penelitian dilakukan pada objek yang alamiah maksudnya, objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Sebagaimana dikemukakan dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau peneliti itu sendiri (*humane instrument*). Untuk dapat menjadi instrumen maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif. Tipe penelitian studi kasus, dalam arti penelitian difokuskan pada satu kasus atau fenomena saja yang dipilih dan ingin dipahami secara mendalam. Kasus atau fenomena yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah kekuatan HMI dan Cangkir Kamisan dalam mempertahankan Visi kota Metro sebelumnya, melalui agenda *setting* serta dengan cara menjalankan ketiga fungsi *civil society* untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah Kota Metro dalam hal ini perubahan Visi kota Metro.

Mengenai tipe penelitian studi kasus, Yin (2002 : 1) menyatakan bahwa secara umum studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* dan *why*, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer di dalam konteks kehidupan nyata. Penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus karena pada penelitian ini terdapat sebuah kasus atau

fenomena yang menjadi objek penelitian yaitu keterlibatan HMI dan Cangkir Kamisan sebagai *civil society* yang memiliki tujuan mensejahterakan masyarakat.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan diteliti mengandung penjelasan mengenai dimensi apa saja yang akan menjadi pusat perhatian serta yang nantinya akan dibahas secara lebih mendalam. Adapun batasan penelitian yang menjadi fokus pada penelitian ini seperti yang dijelaskan dalam kerangka pikir penelitian, yaitu dengan mengacu kepada teori Burhanudin tentang fungsi dari *civil society* negara, yang dapat diukur melalui indikator-indikator di bawah ini.

1. Fungsi komplementer, yang dapat dilihat dari aktivitas/kegiatan yang dilakukan oleh HMI dan Cangkir Kamisan dalam melengkapi peran negara sebagai pelayan publik.
2. Fungsi subtitutor, yang dapat dilihat dari aktivitas/kegiatan yang dilakukan oleh HMI dan Cangkir Kamisan dalam menjalankan peran yang belum dijalankan oleh pemerintah.
3. Fungsi kekuatan tandingan negara, yang dapat dilihat dari peran HMI dan Cangkir Kamisan dalam melakukan advokasi, pendampingan, litigasi, dan praktik-praktik oposisi untuk mengimbangi kekuatan hegemonik negara.
4. Mengacu pada penjelasan Walter Lippmann, Agenda *setting* oleh HMI dan Cangkir Kamisan dapat dilihat dari berbagai upaya yang dilakukan untuk memberikan penonjolan pada isu-isu tertentu dalam hal ini isu perubahan Visi kota Metro yang akan mengkonstruksi gambaran

seseorang, sehingga akan dianggap sebagai sesuatu yang penting oleh anggota publik.

Keempat indikator di atas akan menjawab fungsi *civil society* dan agenda *setting* yang dilakukan HMI dan Cangkir Kamisan terhadap kebijakan di Kota Metro. Sementara kekuatan HMI dan Cangkir Kamisan dalam penyusunan *agenda setting* akan diperdalam melalui pendekatan teori *agenda setting*, yakni melihat saluran/media yang digunakan oleh HMI dan Cangkir Kamisan dalam menyampaikan aspirasi mereka.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sekretariat Himpunan Mahasiswa Islam Kota Metro dan Cangkir Kamisan Kota Metro.

D. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain wawancara secara mendalam.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari para informan di lokasi penelitian. Peneliti memperoleh data primer dari

informan. Informan dalam penelitian ini adalah pengurus dan anggota HMI (Himpunan Mahasiswa Jurusan) cabang Kota Metro dan Cangkir Kamisan Metro.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder berupa dokumentasi dan arsip-arsip resmi yang dapat mendukung penelitian. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi dan referensi yang sudah ada. Data sekunder ini sangat penting bagi peneliti untuk memahami permasalahan yang diteliti secara mendalam. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data tersebut bisa saja merupakan dokumentasi dari majalah, koran, buku-buku, foto, dokumen, media elektronik dan arsip.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara mendalam

Melakukan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber yang dianggap layak atau relevan dengan penelitian ini. Teknik wawancara ini digunakan secara terbuka dan mendalam untuk memberikan kesempatan kepada yang diwawancarai untuk menjawab secara bebas. Hal ini dimaksud untuk memperoleh kejelasan yang belum didapat dari sumber-sumber data dokumentasi dan untuk mendapatkan pengertian dan kejelasan yang lebih mendalam tentang realita sesungguhnya dari objek yang diteliti.

2. Dokumentasi

Teknik ini dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan data-data sekunder yaitu berupa dokumen, arsip-arsip yang berhubungan dengan penelitian.

F. Penentuan Informan

Kriteria yang ditentukan penulis dalam menentukan informan berdasarkan pertimbangan –pertimbangan sebagai berikut.

1. Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cab Kota Metro:

- a. Nama : Muhammad Rozhi Fauzi, S.H.
Usia : 24 Tahun
Jabatan : Ketua Umum HMI Cabang Metro
- b. Nama : Ema Damayanti
Usia : 23 Tahun
Jabatan : Ketua Umum KOHATI HMI Cabang Metro
- c. Nama : Mario Mardanu
Usia : 21 Tahun
Jabatan : Anggota Komisariat Hukum Muhammadiyah Metro

2. Masyarakat yang aktif diskusi Cangkir Kamisan:

- a. Nama : Misaf
Usia : 21 Tahun
Pekerjaan : Mahasiswa (STAIN Perbankan Syariah)
- b. Nama : Dede Maulana Yusuf
Usia : 24 Tahun
Pekerjaan : Mahasiswa (STAIN)
- c. Nama : Rahmat
Usia : 40 Tahun

3. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Metro:

- a. Nama : I Gede Made Swanda, S.STP.
Usia : 36 Tahun
Jabatan : Kepala Bidang Litbang
- b. Nama : Hari Subagyo
Usia : 48 Tahun
Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi
- c. Nama : Sofia Rusdi
Usia : 35 Tahun
Jabatan : Kasubbid Bidang Litbang, Pemerintah, dan Sosial Budaya

4. Masyarakat Kota Metro:

- a. Nama : Binanda F.
Usia : 20 Tahun
Pekerjaan : Mahasiswa
- b. Nama : Rima Silviana Azizah
Usia : 20 Tahun
Pekerjaan : Mahasiswa
- c. Nama : Nisrina Khansa
Usia : 20 Tahun
Pekerjaan : Mahasiswa

G. Teknik Pengolahan Data

Setelah data hasil penelitian dapat dikumpulkan, maka pada tahap selanjutnya adalah pengolahan data, atau dengan kata lain mengubah data kasar menjadi data yang lebih bermakna. Dalam pengolahan data ini peneliti akan memeriksa kembali data-data yang diperoleh dari lapangan dari hasil wawancara agar penelitian ini tetap dapat di arahkan ke fokus penelitian yang seharusnya. Adapun tahapan dari tehnik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Mengumpulkan data, yaitu mengumpulkan data dari hasil wawancara dan studi literatur. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam secara langsung dengan informan. Data yang berasal dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti adalah sekretariat HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dan Cangkir Kamisan Kota Metro.
2. Editing data, kegiatan untuk menentukan kembali data yang diperoleh, menyeleksi data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Seleksi data dilakukan dengan cara memilih data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan studi kepustakaan untuk ditentukan mana yang dapat digunakan terkait penelitian.
3. Interpretasi data merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi yang akurat yang diperoleh dari lapangan.

H. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian ini hanya bersifat menggambarkan dan menjelaskan keadaan di lapangan kedalam bentuk tampilan kalimat yang sistematis serta dilengkapi keterangan-keterangan yang mendukung dalam memperoleh kesimpulan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisa data dapat dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut.

1. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan yang ditulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarah, membuang yang tidak perlu, mengorganisir data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Dalam hal ini, peneliti melakukan pemilihan data yang didapat dari lapangan yang dapat diperlukan berdasarkan fokus penelitian dengan batasan data yang ada dalam pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya. Hal tersebut disesuaikan dan dipilih data yang berguna untuk disajikan dalam penyajian data, terkait peran *civil society* di Kota Metro, khususnya peran HMI dan Cangkir Kamisan dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap Pemerintah Kota Metro, serta mengenai kekuatan dan akses HMI dan Cangkir Kamisan dalam penyusunan *agenda setting* kebijakan publik di Kota Metro.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering di gunakan pada data kualitatif adalah bentuk teks naratif. Transkrip yang telah direduksi dilakukan display berdasarkan fokus penelitian dalam bentuk tabel dan narasi.

3. Verifikasi dan Kesimpulan

Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisa kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keterangan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsi. Hasil verifikasi data tersebut kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian (Milles dan Huberman, 1992 : 15-21). Dalam penelitian ini, hasil penelitian diuraikan dalam hasil dan pembahasan yakni: (1) peran HMI dan Cangkir Kamisan dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap Pemerintah Kota Metro; dan (2) kekuatan dan akses HMI dan Cangkir Kamisan dalam penyusunan *agenda setting* kebijakan publik di Kota Metro.

I. Uji Keabsahan Data

Penelitian kualitatif, terdapat 4 (empat) bentuk uji keabsahan data, yaitu uji kredibilitas data (validitas internal), uji dependabilitas (reliabilitas) data, uji transferabilitas (validitas eksternal), dan uji konfirmabilitas (objektivitas) (Prastowo, 2011 : 265). Namun dari keempat bentuk tersebut, uji kredibilitas data adalah yang paling sering digunakan. Uji kredibilitas data memiliki dua fungsi, yaitu melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan kita dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti (Prastowo, 2011 : 266).

Untuk menguji kredibilitas data, dapat dilakukan dengan tujuh teknik, yaitu perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, *member check*, analisis kasus negatif, dan menggunakan bahan referensi (Prastowo, 2011 : 265). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji kredibilitas dengan teknik triangulasi.

Moleong (2006 : 330) menjelaskan bahwa triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Denzin (Prastowo, 2011 : 269) membedakan teknik ini menjadi lima macam, antara lain sebagai berikut.

1. Triangulasi sumber, yaitu suatu teknis pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapatkan melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik, yaitu suatu teknik pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda.
3. Triangulasi waktu, yaitu suatu teknik pengecekan kredibilitas data dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, dan teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.
4. Triangulasi penyidik, yaitu cara pemeriksaan kredibilitas data yang dilakukan dengan memanfaatkan pengamat lain untuk pengecekan derajat kepercayaan data.

5. Triangulasi teori, yaitu cara pemeriksaan kredibilitas data yang dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teori untuk memeriksa data temuan penelitian (Denzin dalam Prastowo, 2011 : 269).

Adapun dari kelima macam triangulasi di atas, peneliti dalam melakukan analisis data menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dari para informan yang dituju. Triangulasi teknik dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yaitu data yang diperoleh dengan wawancara, kemudian dicek dengan observasi dan dokumentasi.

IV. GAMBARAN UMUM

Bab ini memaparkan gambaran umum mengenai *civil society* yang diteliti, yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Cangkir Kamisan. Selain itu, peneliti juga memaparkan gambaran tentang daerah/tempat penelitian dilakukan, yakni Kota Metro.

A. Gambaran Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Metro

Himpunan Mahasiswa Islam dalam tingkat nasional berdiri pada tanggal 14 Rabiul Awal 1366 H atau bertepatan dengan 05 Februari 1947, di salah satu ruangan kuliah Sekolah Tinggi Islam (STI) (Agussalim, 1976). Tokoh utama pendirinya adalah Lafran Pane yang pada saat itu adalah seorang mahasiswa STI tingkat pertama bersama mahasiswa STI lainnya, diantaranya: Karnoto Zarkasyi, Dahlan Husein, Maissaroh Hilal, Suwali, Yusdi Ghozali, Mansyur, Siti Zainah, M. Anwar, Hasan Basri, Marwan, Zulkarnaen, Tayeb Razak, Toha Mashudi, dan Badron Hadi.

Pendirian Himpunan Mahasiswa Islam dilatar belakangi oleh beberapa hal yakni adanya keinginan mahasiswa menciptakan organisasi sebagai media berkoordinasi antar mahasiswa se-Indonesia. Peran HMI juga tidak dapat dilepaskan dari kemerdekaan Indonesia. Dalam buku Sejarah dan Perjuangan

HMI (1974-1975) dijelaskan bahwa terdapat 3 faktor berdirinya HMI yakni, Pertama situasi NKRI. Kedua, kondisi umat Islam Indonesia. Ketiga, situasi dunia perguruan tinggi dan kemahasiswaan (Sitompul, 1976)..

Adapun tujuan HMI ketika pertama berdiri adalah: (1) mempertahankan negara Republik Indonesia, mempertinggi derajat rakyat Indonesia; dan (2) menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam. Seiring dengan berjalannya waktu, HMI mengalami perkembangan, dimana tujuannya saat ini adalah terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdian yang bernaftaskan Islam dan bertanggung jawab atas terbentuknya masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.

HMI memiliki cabang di beberapa kota di Indonesia, Kota Metro, salah satunya. Organisasi HMI di Cabang Kota Metro didirikan pada tahun 1967 yang digagas oleh Saironi Asir. HMI kemudian diresmikan satu tahun kemudian yakni pada tahun 1968 oleh Pengurus Besar HMI. Tidak jauh berbeda dengan fungsi HMI dicabang lainnya, HMI Cabang Kota Metro juga berfungsi untuk menjadi wadah calon sarjana atau cendikiawan. HMI bukan organisasi massa ataupun alat politik praktis. Sejak sepuluh tahun diawal pendirian HMI di Kota Metro, tidak ada kritik HMI yang terlampau mencolok.

Secara umum pengurus HMI terdiri dari seorang Ketua Umum yang membawahi Ketua Bidang PPPA, PTKP, KPP, HAPU, PP, dan TIK. Seorang Sekretaris Umum yang membawahi Wakil Sekretaris bidang

PPPA, PTKP, KPP, HAPU, PP, TIK. Bendahara Umum yang membawahi Wakil Bendahara Umum seperti pada bagan dibawah.



Gambar 2. Struktur Kepengurusan HMI

B. Gambaran Umum Cangkir Kamisan Kota Metro

Terkait dengan isu *civil society* di Kota Metro selain berdirinya sejumlah organisasi struktural terdapat pula komunitas diskusi. Cangkir Kamisan merupakan salah satu komunitas yang aktif dalam mendiskusikan isu-isu strategis tentang kebijakan-kebijakan Kota Metro. Komunitas Cangkir Kamisan, nama tersebut berasal dari akronim “CangKir” yaitu dari kata ‘Bincang’ dan ‘Pikir’ (Wahab dalam Setyawan, 2015: 400). Secara filosofis, cangkir memiliki makna yaitu sebuah tempat atau wadah yang bisa diisi dengan berbagai macam minuman air teh, kopi, susu dan lainnya yang juga dapat mewakili berbagai macam rasa kehidupan. Kemudian, komunitas cangkir tersebut melakukan diskusi rutin yang bergulir setiap kamsis malam. Diskusi dimulai sejak ba’da isya hingga selesai, dan beberapa pegiat ada yang bertahan hingga dini hari. Setelah berjalan beberapa bulan, komunitas ini kemudian dikenal dengan nama komunitas cangkir kamsian (Wahab dalam Setyawan, 2015: 400).

Munculnya Komunitas Cangkir Kamisan di Kota Metro menjadi fenomena menarik. Berawal dari sebuah komunitas diskusi kamisan (malam jumat) yang terdiri dari bermacam latar belakang pegiat. Bincang pikir (Cangkir) sebuah filosofi kultural sebuah diskusi minum kopi dengan santai tapi penuh dengan obrolan serius. Pegiat komunitas ini beragam mulai dari akademisi, jurnalis, penulis, aktivis mahasiswa, pengusaha, wiraswasta, tokoh agama, dan warga metro.

Komunitas ini digawangi oleh Oki Hajiansyah Wahab, Rahmatul Ummah dan Dharma Setyawan yang sepakat membangun komunitas epistemik (diskusi pengetahuan yang berkelanjutan). Oki Hajiansyah Wahab adalah anggota AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Bandar Lampung sekaligus salah satu pendiri Front Mahasiswa Nasional (FMN), kandidat Doktor di Universitas Diponegoro (UNDIP) yang mengabdikan dirinya sebagai peneliti dan aktifis agraria yang telah mengadvokasi konflik agraria Register 45 Mesuji Lampung sejak tahun 2006. Rahmatul Ummah adalah mantan ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Metro periode 2009-2014, saat masih menjadi mahasiswa pernah menjadi ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Metro dan sekaligus deklaratator organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di kota Metro (Wahab dalam Setyawan, 2015: 400).

Dharma Setyawan adalah mantan ketua KAMMI Metro 2009, alumni STAIN Jurai Siwo Metro tersebut melanjutkan S2 di Universitas Gadjah Mada. Kemudian setelah lulus dari Universitas Gadjah Mada ia memilih

karier sebagai akademisi di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Jurai Siwo Metro. Mereka dipertemukan dalam kesatuan ide sebagai kolumnis di media massa lokal Lampungpost. Pertemuan mereka membicarakan banyak hal, termasuk kegelisahan akan perkembangan kota dan masa depan minoritas kreatif. Termasuk mimpi besar membangun peradaban kota, sebuah peradaban alternatif yang kelahirannya dibidani warga kota, mengutamakan partisipasi kesetaraan dari pada instruksi hirarkis, menempatkan lebih tinggi prestasi dari pada prestasi mendahulukan gagasan dari pada tujuan materi (Wahab dalam Setyawan, 2015: 400).

Prinsip yang disebutkan seperti partisipasi kesetaraan diletakkan dalam aplikasi berkomunitas. Misalnya tradisi bantingan atau iuran, tradisi ini meletakkan pembangunan kemandirian komunitas. Penting akan adanya sebuah tradisi dimana komunitas tidak hanya menggunakan fasilitas dan menengadahkan tangan ke atas, akan tetapi mulai bertindak bersama secara urunan yang biasa komunitas menyebutnya sebagai bantingan (Wahab dalam Setyawan, 2015: 401).

Gagasan utama yang dibawa oleh cangkir kamsan ialah melestarikan budaya literasi serta mengoptimalkan potensi dan kreativitas masyarakat Kota Metro. Berdasarkan gagasan tersebut, cangkir kamsan membudayakan kegiatan membaca dan menulis disela-sela kegiatan diskusinya. Melalui forum Cangkir kamsan lahir pula komunitas-komunitas yang mengembangkan kegiatan cangkir kamsan seperti fotografi, jurnalistik dan lain sebagainya. Komunitas-komunitas tersebut menghidupkan laman pojok

sumber sebagai media yang berbasis jurnalisme warga, bertujuan untuk membuat masyarakat secara mandiri dapat saling menyampaikan mendapatkan informasi tanpa bergantung pada peran jurnalis. Laman tersebut juga sebagai alat cangkir kamisen yang diharapkan mampu menjadi mitra promosi bisnis, jasa maupun pendidikan bagi masyarakat Kota Metro.

C. Gambaran Umum Kota Metro

Sejarah Kota Metro sebagai pusat pemerintah Kecamatan Metro Raya dan Ibukota Kabupaten Lampung Tengah, yang kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1986 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1986. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 pada tanggal 27 April 1999 diremikan sebagai daerah otonomi oleh Menteri Dalam Negeri (Letjen TNI Syarwan Hamid) di Plaza Departemen Dalam Negeri Jakarta, bersama-sama dengan Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Lampung Timur (Metro dalam Angka 2016).

1. Telaah Visi dan Misi Kota Metro Tahun 2005-2015

Kota Metro sebagai kota kecil berada di antara dua kabupaten, Lampung tengah dan Lampung timur. Dengan luas wilayah 66,74 km dengan populasi 145.471 jiwa sejak tahun 2005 mempunyai visi “Mewujudkan Kota Metro Sebagai Kota Pendidikan yang unggul dan masyarakatnya yang sejahtera”. Guna mewujudkan visi tersebut Kota Metro mempunyai Misi:

- a. Membangun sumber daya manusia yang bertaqwa, berkualitas, profesional, unggul, berdaya saing dan berakhlak mulia melalui sistem

pendidikan yang terarah dan komperhensif. Misi I (pertama) mempunyai tujuan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
 - 2) Menciptakan lingkungan belajar di masyarakat.
 - 3) Meningkatkan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana.
- b. Menciptakan keseimbangan pembangunan kota dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup menuju pembangunan yang berkelanjutan.
- c. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berbasis perdagangan dan agroindustri, memperbaiki iklim usaha, menarik investasi dan penyediaan lapangan kerja.
- d. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab.
- e. Mewujudkan kehidupan demokrasi dalam segala aspek kehidupan, menjunjung tinggi dan menghormati hak azasi manusia, menjunjung tinggi hukum dan menjamin tegaknya supremasi hukum.
- f. Membangun serta meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur guna mendukung pembangunan daerah.
- g. Mewujudkan kemandirian rakyat melalui prinsip-prinsip otonomi.

(Data Bappeda Kota Metro tahun 2013)

Selain itu, Kota Metro ditunjang oleh 13 Perguruan Tinggi yang ada di Metro, dan banyaknya sekolah dari tingkat prasekolah sampai menengah atas. Oleh karena itu, kota yang baru resmi terpisah dari kabupaten Lampung Tengah pada 27 April 1999 ini telah berupaya menuju kota

pendidikan semenjak tahun 2005. Saat itu kepemimpinan kota Metro dipegang oleh Lukman Hakim. Dengan Alokasi anggaran pendidikan sebesar 30% dari Anggaran (Nadwah, 2014: 60).

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro. Posisi Kota Metro yang berada di tengah-tengah Provinsi Lampung membuat Kota Metro memiliki daya tarik bagi penduduk luar daerah untuk melakukan berbagai aktivitas khususnya untuk memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan, serta jasa perkotaan lainnya, termasuk aktivitas ekonomi. Selain itu dari sisi kualitas pendidikan cukup berprestasi.

Selanjutnya di Kota Metro juga di tunjang dengan fasilitas penunjang pendidikan *nonformal*, seperti rumah baca atau griya baca, rumah pintar, perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah. Selanjutnya lokasi yang tidak begitu luas juga mempengaruhi untuk diarahkan menjadi kota pendidikan. Pengembangan fasilitas pendidikan sangat diutamakan, dengan meningkatkan sarana dan prasarana sekolah, yaitu membangun sekolah lebih permanen, mengganti atap dari asbes atau seng menjadi genteng (Nadwah, 2014: 61)

Selain fasilitas, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) pun dilakukan, dengan meningkatkan sumber daya guru-guru dari Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas. Pada periode 2010-2015 Walikota Lukman Hakim melanjutkan kembali visinya. Dalam periode ini tujuannya adalah lebih menajamkan visi tersebut dengan menjadikan kota Metro yang unggul dan sejahtera. Misi yang pertama adalah “Melanjutkan

Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berakhlak Mulia melalui Peningkatan iklim dan Budaya Belajar Masyarakat, Pemerataan Fasilitas serta Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Memadai”.

Berkaitan dengan visi Kota Metro sebagai kota pendidikan, isu strategis yang berkembang adalah bagaimana membudayakan perilaku masyarakat Kota Metro untuk membudayakan belajar, berperilaku hidup sehat dan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjadikan belajar dan pengamalan agama menjadi sangat bermanfaat, sehingga benar-benar menjadi karakter masyarakat Kota Metro yang berbudaya belajar. Oleh sebab itu dibentuklah skala prioritas setiap tahapan lima tahunan tetapi merupakan satu kesatuan yang berkelanjutan.

Tabel 1. Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Pendek

| Kondisi Per Periode | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|
| Bidang | 1999-2005 (Fase Fisik) | 2006-2010 (Fase Akademik) | 2011-2015 (Fase Produk) | 2016-2020 (Fase Pengakuan Masyarakat) |
| Pendidikan Formal | Sarana prasarana dan peralatan sekolah terpenuhi | Mutu SDM (Guru, murid, Tng Kepn. Tinggi) Mutu BM Performance | Mutu Produk guru, dosen, murid, tenaga Kependidikan Tinggi | Produk sekolah PT diterima masyarakat |
| Pendidikan Informal | Sarana dan alat belajar di rumah terpenuhi | Anggota keluarga memiliki literasi/kecerdasan hidup tinggi | Anggota Keluarga memiliki produk kecerdasan hidup bermutu | Produk Anggota Keluarga diterima masyarakat |

| | | | | |
|------------------------------------|---|--|---|--|
| Pendidikan Non Formal | Sarana dan sumber belajar di institusi masyarakat tercukupi | Tokoh masyarakat, tokoh agama, pejabat memiliki literasi/kecerdasan profesi yang standar | Tokoh-tokoh/pejabat masyarakat memiliki produk literasi/profesi bermutu | Produk tokoh/pejabat pendidikan masyarakat diterima masyarakat |
| Masyarakat Umum (Community) | Warga masyarakat memiliki sarana, alat belajar yang cukup | Anggota warga masyarakat memiliki literasi minimal | Anggota warga masyarakat memiliki produk literasi bermutu | Produk Anggota warga masyarakat diterima masyarakat |
| Ciri Khusus | Masyarakat Dengar (Pendengar) | Masyarakat Baca (Pembaca) | Masyarakat Belajar | Masyarakat Berbudaya |

(Dinas Pendidikan Kota Metro 2011)

2. Telaah Visi Misi Kota Metro 2016-2020 (Pasca Perubahan)

Kota Metro kini bertransformasi dari daerah transmigrasi menjadi kota pendidikan. Berdasarkan data Pemerintah Kota Metro, ada 50.000 pelajar dari luar Metro menempuh pendidikan di kota tersebut. Sebanyak 60 persen pelajar SMA dan 80% pelajar SMK di Kota Metro berasal dari luar kota. Sebagai kota yang berjuluk kota pendidikan, Kota Metro memungkinkan bagi tumbuhnya para intelektual. Sayangnya, tradisi-tradisi intelektual seperti diskusi dan kebiasaan menulis belum tumbuh dengan baik (https://sipd.kemendagri.go.id/dokumen/uploads/visimisi_163_2016.pdf).

Disisi lain, saat ini Kota Metro juga tengah menjadi tujuan wisata keluarga bagi masyarakat Metro dan sekitarnya dengan memanfaatkan Taman Kota. Hal ini tentu menjadi potensi yang menggembirakan bila dapat ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Misalnya pembangunan

kawasan DAM Raman yang terletak di Kecamatan Metro Utara adalah juga kawasan potensial untuk dikembangkan untuk sektor wisata kota Metro (https://sipd.kemendagri.go.id/dokumen/uploads/visimisi_163_2016.pdf diakses pada Mei 2017).

Atas dasar tersebut di tahun 2016 Kota Metro mengalami Penambahan Visi yaitu “Mewujudkan Kota Metro sebagai kota pendidikan dan wisata keluarga berbasis ekonomi kerakyatan berlandaskan pembangunan”. (<http://info.metrokota.go.id/visi-misi/>, akses 03 Mei 2017)

- a. Membangun SDM yang bertaqwa, berkualitas, profesional, unggul, berdaya saing dan berakhlak mulia melalui sistem pendidikan yang terarah dan komprehensif.
- b. Menciptakan keseimbangan pembangunan kota dengan memperhatikan kelestarian SDA dan mutu lingkungan hidup menuju pembangunan yang berkelanjutan.
- c. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berbasis perdagangan dan agroindustri, memperbaiki iklim usaha, menarik investasi dan penyediaan lapangan kerja.
- d. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab.
- e. Mewujudkan kehidupan demokrasi dalam segala aspek kehidupan, menjunjung tinggi dan menghormati HAM, menjunjung tinggi hukum dan menjamin tegaknya supremasi hukum.
- f. Membangun serta meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur guna mendukung pembangunan daerah.

- g. Mewujudkan kemandirian rakyat melalui prinsip-prinsip otonomi.
(<http://info.metrokota.go.id/visi-misi/>)

Berdasarkan visi Kota Metro, pemerintah mengerucutkan isu-isu strategis ke dalam 10 (sepuluh) poin, yang mana masing-masing terdapat arah kebijakan umum yang akan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja Pemerintah Kota Metro, yakni sebagai berikut.

a. Kebijakan Umum Bidang Pendidikan

- Terwujudnya kualitas SDM di masyarakat melalui jenjang pendidikan formal dan non formal.
- Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan.

b. Kebijakan Umum Bidang Keagamaan

- Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan lembaga agama.

c. Kebijakan Umum Bidang Kesehatan

- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui usaha-usaha pelayanan dan penyuluhan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.

d. Kebijakan Umum Bidang Kependudukan

- Membangun ketahanan sosial yang mampu memberikan bantuan penyematan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan kualitas SDM pencari kerja guna mempersiapkan tenaga kerja yang profesional, handal, dan siap kerja.

e. Kebijakan Umum Bidang Lingkungan Hidup

- Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diimbangi dengan pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan SDA.

f. Kebijakan Umum Bidang Perkotaan

- Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana publik guna mendorong pembangunan, percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, serta penanganan dampak bencana alam.
- Mengoptimalkan pemanfaatan dan penataan ruang kota.
- Meningkatkan mutu hasil penelitian dan pendataan guna menunjang perencanaan dan pengembangan pembangunan daerah.

g. Kebijakan Umum Bidang Perekonomian Daerah

- Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang didukung oleh pembangunan industri, peningkatan pemanfaatan dan penguasaan teknologi.
- Meningkatkan kemampuan dan produktivitas usaha melalui optimalisasi sumberdaya pertanian, peternakan, perikanan, dll.
- Mengembangkan pertanian dengan wawasan bisnis, menghasilkan nilai tambah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pertanian.
- Pengembangan iklim investasi pembukaan penanaman modal dan pengembangan perusahaan daerah.

h. Kebijakan Umum Bidang Kualitas Aparatur

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara melalui penataan kelembagaan, manajemen publik dan peningkatan kapasitas SDM aparatur.

i. Kebijakan Umum Bidang Otonomi Daerah

- Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat.

j. Kebijakan Umum Bidang Partisipasi Masyarakat

- Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan pemenuhan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- Pengembangan kreativitas kepemudaan dan olahraga (<http://info.metrokota.go.id/isu-strategis>, diakses pada Mei 2017)

Demikianlah paparan mengenai HMI dan Cangkir Kamisan sebagai *civil society* yang turut andil dalam mengawasi jalannya pemerintahan di Kota Metro, sebagai bentuk upaya mereka dalam menjalankan fungsi *social control civil society* terhadap pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan paparan di atas, terlihat bahwa aspek pendidikan memang telah menjadi visi Kota Metro sejak didirikannya. Pendidikan juga menjadi isu strategis utama Pemerintah Kota Metro, yang

mendasari dirumuskannya arah kebijakan umum, guna mewujudkan visi dan misi dari Kota Metro.

Di samping itu, dewasa ini, ekonomi kreatif dan pariwisata pun menjadi bagian dari visi yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kota Metro. Untuk itu, dalam pelaksanaan kebijakan yang ditunjukkan untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, dibutuhkan adanya peran pengawasan dari *civil society*, yang dalam hal ini dikerucutkan menjadi dua kelompok, yakni HMI dan Cangkir Kamisan. Pada bab berikutnya akan diberikan penjelasan mengenai peran HMI dan Cangkir Kamisan dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap Pemerintah Kota Metro, kekuatan dan akses kedua *civil society* tersebut dalam penyusunan *agenda setting* kebijakan publik di Kota Metro.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan judul “Analisis Peran HMI dan Cangkir Kamisan Dalam Penyusunan *Agenda Setting* Terhadap Penambahan Visi Kota Metro” maka peneliti menyimpulkan :

1. HMI telah berperan sebagai komplementer dari Pemerintah Kota Metro, dengan membentuk wadah bagi masyarakat Kota Metro melalui aliansinya untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah, karena di sisi lain, pemerintah belum secara optimal memberikan perhatiannya kepada masyarakat yang ingin menyuarakan aspirasinya. HMI telah melakukan serangkaian upaya untuk menyampaikan pandangannya, dengan melakukan pengkajian, mengumpulkan data-data yang relevan, dan melakukan audiensi dengan pemerintah. Apabila tahap audiensi tidak ditanggapi dengan responsif, maka jalan terakhir yang ditempuh oleh HMI adalah melalui aksi.

Dalam fungsi tandingan negara, HMI telah melakukan advokasi dan pendampingan yang dilakukan melalui diskusi, kajian, dan audiensi kepada pemerintah. Advokasi dalam hal ini ditujukan untuk memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan kebutuhan dan

keluhannya, dengan pemerintah sebagai aktor pengambil keputusan, agar diantara keduanya tercipta keselarasan dan kepentingan bersama dapat terwujud. Namun, dalam fungsi substitutor, belum dapat terlihat peranan yang dilakukan oleh HMI.

2. Sebagai komplementer, Cangkir Kamisan memiliki berbagai aktivitas yang ditujukan untuk memajukan kesejahteraan dengan mengembangkan dan menggiatkan pelbagai kegiatan yang ditujukan untuk melengkapi peran negara sebagai pelayan publik. Cangkir Kamisan berperan dalam merealisasikan visi Pemerintah Kota Metro, yang dalam hal ini ingin menjadikan Metro tak hanya sebagai kota pendidikan, akan tetapi menjadikan Metro sebagai kota wisata keluarga dengan berbasiskan perekonomian kerakyatan.

Cangkir Kamisan telah melakukan fungsi sebagai pelayan publik, sebagaimana yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan oleh Cangkir Kamisan adalah untuk melengkapi fungsi yang belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Metro. Akan tetapi, dalam hal ini apa yang telah dilakukan oleh Cangkir Kamisan dapat dipadupadankan dengan program kerja pemerintah yang sejalan, atau justru dapat dikembangkan lebih lanjut lagi, sehingga akan tercipta kesinergian antara *civil society* dan pemerintah, demi kepentingan bersama.

Bentuk pelaksanaan fungsi substitutor Cangkir Kamisan dilihat dari dua kegiatan, yakni: menggagas terbentuknya Bank Sampah Cangkir Hijau dan mengembangkan industri kreatif, yakni Metro Photography, industri ini bergerak di bidang permusikan dan perfilman, serta dokumenter. Cangkir Kamisan telah melakukan fungsi sebagai pelayan publik, sebagaimana yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan oleh Cangkir Kamisan adalah untuk melengkapi fungsi yang belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Metro. Cangkir Kamisan telah menjalankan dua fungsinya, yakni sebagai komplementer dan substitutor. Cangkir Kamisan hanya berperan sebagai fasilitator masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya.

3. Upaya penyusunan *agenda setting* oleh HMI terkait penambahan visi Kota Metro tidak mendapatkan hasil yang optimal. Hal ini dikarenakan terbentur dengan adanya peraturan Kementerian Dalam Negeri yang menyebutkan bahwa visi yang telah disampaikan sebelumnya oleh pasangan calon walikota ketika proses kampanye, yang telah terangkum dalam dokumen DPRD dan KPUD maka visi tersebut tidak bisa dirubah. Upaya penyusunan *agenda setting* oleh Cangkir Kamisan yakni dengan membentuk persepsi publik, sehingga pada akhirnya persepsi publik akan terbentuk dan memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi proses penyusunan *agenda setting* kebijakan publik. Upaya tersebut juga tidak mendapat hasil yang optimal karena peraturan Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan bahwa tidak boleh adanya perubahan visi

beserta arah kebijakan yang telah disampaikan sebelumnya pada saat kampanye.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan terkait peran HMI dan Cangkir Kamisan dalam melakukan penyusunan *agenda setting* terhadap kebijakan penambahan visi Kota Metro, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Dengan merujuk pada peraturan Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan bahwa tidak boleh adanya perubahan visi beserta arah kebijakan yang telah disampaikan sebelumnya pada saat kampanye maka sebagai *civil society* hendaknya menerima serta mendukung kebijakan pemerintah terkait dengan penambahan visi tersebut.
2. HMI dan Cangkir Kamisan tetap melaksanakan fungsi kontrol sebagaimana fungsi *civil society* yaitu sebagai komplementer, substitutor, sebagai kekuatan tandingan negara dengan melakukan advokasi, pendampingan, litigasi dan lainnya sebagai upaya mewujudkan *good governance*.
3. Penambahan Kota Metro sebagai Kota Pariwisata Keluarga hendaknya tidak mengurangi semangat budaya literasi yang telah dibangun oleh HMI dan Cangkir Kamisan. Dengan terus menjalankan serangkaian aktivitas yang edukatif guna mempercepat tercapainya visi Kota Metro sebagai Kota Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi dkk. 2003. *Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia*. Jakarta. INCIS.
- Bahmuller, CF. 1997. *The Role of Civil Society in the Promotion and Maintenance of Constitution Liberal Democracy*.
- Djunaidi, Ghonn,. 2008. *Penelitian Tindakan Kelas*. Malang. Uin-Malang Press.
- Fisipol UGM, 1991, *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung jawab*". *Laporan Akhir Penelian* , Litbang Depdagri, Jakarta.
- Gellner, Ernest. 1995 "*The Importance of Being Modular*", dalam John A. Hall, *Civil Society: Theory, History, Comparison*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hardiman, F.Budi. 2010. *Komersialisasi Ruang Publik menurut Hannah Arendt dan Jurgen Habermas dalam ruang publik, melacak "partisipasi demokratis" dari polis sampai cyberspaace*. Kanisisus. Yogyakarta.
- Hikam, Muhammad AS. 1996. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES.
- Hikam, Muhammad A.S. 2000. *Islam Demokrasi dan Pemberdayaan Civil Society*. Jakarta. Erlangga.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gava Media.
- Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*. Jakarta. UI Press.
- Moleong, J, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.

- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Raharjo, Dawam. 1999. *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*. Jakarta. LSF.
- Rusli, Budiman. 2013. *Kebijakan Publik (Membangun Pelayanan Publik yang Responsif)*. Bandung. Hakim Publishing.
- Sitompul, Agussalim. 1976. *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam 1947 – 1975*. Surabaya. Bina Ilmu Offset.
- Subarsono, AG. 2012. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Tilaar, H. A. R. 2002. *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*, Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Tim ICCE UIN Jakarta 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta. Prenada Media.
- Wahab, A. 2008. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi Keimplementasi Kebijaksanaan Negara Ed.2*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Weaver et all. 1981. *Media Agenda Setting in Presidential Election, Issue Image and Interest*. New York. Praeger Publisher.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta. CAPS.
- Wright, Charles, R. 1992. *Sosiologi Komunikasi Massa, Penyunting Jalaludin Rakhmat*. Bandung. Remaja Karya.
- Yin, Robert K. 2002. *Study Kasus (Desain dan Metode), (Case Study Research Design and Methods) diterjemahkan oleh M. Djauzi Mudzakir*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal dan Tesis

- Diba, Farah. “Analisis Framing pada Pemberitaan Politik Partai Hanura di Media Online Sindonews”, *eJournal Ilmu Komunikasi*, Volume 2, Nomor 3, 2014
- Hasan, M. Nur. 2006. “Visi Sosial dan Moral Politik NU dalam pemberdayaan Civil Society”. *Tesis Ilmu Filsafat Universitas Indonesia*.

- Nadwah, Hani Lina. 2014. "Visi Dan Misi Kota Metro Sebagai Kota Pendidikan (Studi Evaluasi Tentang Program Pengembangan Minat Baca Melalui Perpustakaan Kelurahan/Rumah Pintar Di Kecamatan Metro Barat)". *Tesis Universitas Lampung*.
- Pandie, D. B. W. 2012. "Dinamika Studi Kebijakan Publik dalam Dimensi Ekonomi-Politik". *Jurnal Administrasi Publik*.
- Rahim, E. I. 2013. "Partisipasi dalam Perspektif Kebijakan Publik". *Jurnal Ekonomi. Universitas Negeri Gorontalo*.
- Rosid, Fathor. 2014. "Dinamika Gerakan Sosial (Study Peran Intelektual dalam Melakukan Gerakan Sosial dengan Masyarakat Sipil Untuk Mendapatkan Pelayanan Listrik di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember)." *Jurnal Mahasiswa Sosiologi Universitas Brawijaya*.
- Setyawan, Dharma. 2015. "Gerakan komunitas cangkir Kamisan membangun ekonomi Kreatif di metro lampung Jurnal Bisnis", *Stain jurai siwo metro lampung* vol. 3, no. 2.
- Suryadi, Adi. 2009. "Civil society di Indonesia: Study Kasus Petisi 50". *Tesis Ilmu Politik Universitas Indonesia*.

Website

- <http://www.gentamerah.com/2016/10/hmi-meminta-tangkap-transaksional.html>, diakses pada Mei 2017.
- <http://www.info.metrokota.go.id/isu-strategis>, diakses pada Mei 2017.
- <http://www.info.metrokota.go.id/visi-misi/>, diakses Mei 2017.
- <https://www.kompasiana.com/rahmatul.ummah/pojoksamber-com-portal-jurnalisme-warga>, diakses pada tanggal 25 Juni 2017.
- <https://www.lampung.antaraneews.com/berita/273499/masyarakat-sipil-lampung-hadapi-tantangan-internal>, di akses pada Januari 2017.
- <http://www.pojoksamber.com/berita-foto-konsultan-kemen-trian-pudari-perancis-kunjungi-bank-sampah-cangkir-hijau>, diakses pada September 2017.
- <http://www.populicenter.org>, diakses pada September 2017

https://www.sipd.kemendagri.go.id/dokumen/uploads/visimisi_163_2016.pdf, diakses pada Mei 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dokumen

AD/ART Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

Data Kepengurusan HMI Kota Metro

Data Bappeda Kota Metro Tahun 2013

Data Dinas Pendidikan Kota Metro Tahun 2011

Data BPSMetro Dalam Angka Tahun 2016